



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

## **STRATEGI PENANGGULANGAN KETIMPANGAN SPASIAL ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

Peneliti:

**Nurul Istifadah, SE., M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006  
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006  
Tanggal 12 April 2006  
Nomor urut: 6

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



LAPORAN PENELITIAN  
DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2006

## STRATEGI PENANGGULANGAN KETIMPANGAN SPASIAL ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Peneliti:

Nurul Istifadah, SE., M.Si.

. KKB  
KK-2  
4P 30/08  
1st  
5

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun 2006  
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 2264/J03/PG/2006  
Tanggal 12 April 2006  
Nomor urut: 6

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2006





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
 E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

<b>1. Judul Penelitian</b>	:	STRATEGI PENANGGULANGAN KETIMPANGAN SPASIAL ANTAR KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR		
a. Macam Penelitian	:	<input type="checkbox"/> Fundamental	<input type="checkbox"/> Terapan	<input type="checkbox"/> Pengembangan
b. Katagori Penelitian	:	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> III
<b>2. Kepala Proyek Penelitian</b>				
a. Nama lengkap dan Gelar	:	Nurul Istifadah, S.E., M.Si.		
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan		
c. Pangkat/Golongan/NIP	:	Penata Muda Tk. 1 / IIB / 132 205 435		
d. Jabatan Sekarang	:	Asisten Ahli		
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	Ekonomi		
f. Univ./Ins/Akademi	:	Universitas Airlangga		
g. Bidang ilmu yang diteliti	:	Perencanaan Regional		
<b>3. Jumlah Tim Peneliti</b>	:	1 (Satu) orang		
<b>4. Lokasi Penelitian</b>	:	Propinsi Jawa Timur		
<b>5. Kerjasama dengan Instansi Lain</b>				
a. Nama Instansi	:	-		
b. Alamat	:	-		
<b>6. Jangka waktu penelitian</b>	:	5 (Lima) bulan		
<b>7. Biaya yang diperlukan</b>	:	Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)		
<b>8. Seminar Hasil Penelitian</b>				
a. Dilaksanakan Tanggal	:	18 September 2006		
b. Hasil Penelitian	:	<input type="checkbox"/> Baik Sekali	<input checked="" type="checkbox"/> Baik	
		<input type="checkbox"/> Sedang	<input type="checkbox"/> Kurang	

Surabaya, 28 September 2006



Mengetahui/Mengesahkan  
 a.n. Rektor  
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Universitas Airlangga,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
 NIP 130 701 125

## RINGKASAN

**STRATEGI PENANGGULANGAN KETIMPANGAN SPASIAL ANTAR  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

(Nurul Istifadah, 2006, 49 halaman)

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dalam kenyataannya seringkali timbul *trade off* antara tujuan pertumbuhan ekonomi sektoral dan aspek pemerataan regional. Ketidak-merataan secara spasial disebabkan karena adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja yang terampil. Ketimpangan juga disebabkan karena redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004 : 127).

Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar diantara provinsi lain di Indonesia, merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antar kabupaten / kotanya. Hal itu karena adanya perbedaan kondisi sumber daya dan hasil pembangunan. Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi di antara kabupaten / kota di Jawa Timur juga menimbulkan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, sehingga menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar.

◦ Untuk mengetahui klasifikasi kondisi pembangunan ekonomi masing-masing kabupaten / kota di Jawa Timur, didasarkan pada indikator fundamental ekonomi, yaitu indikator yang mencerminkan kondisi riil ekonomi daerah yang meliputi : pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) (Kuncoro, 2004 : 125).

Berdasar latar belakang diatas, maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian yang mendalam tentang klasifikasi daerah kabupaten / kota di Jawa

Timur berdasarkan fundamental ekonomi untuk melihat kondisi ketimpangan spasial yang terjadi. Penyusunan konsep maupun indikator ekonomi daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pengalokasian dana pembangunan, sehingga tercapai efisiensi pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tepat sasaran pada daerah yang relatif tertinggal.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM), (2) berdasarkan klasifikasi tersebut, kemudian dianalisis pola ketimpangan spasial yang terjadi antar kabupaten / kota di Jawa Timur, (3) merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur.

Untuk mengetahui pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur digunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM. Sedangkan untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur digunakan indeks Williamson dan indeks Theil. Strategi pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur dicapai dengan melakukan pendekatan regional dan sektoral di sektor basis. Sektor basis merupakan penggerak utama (*prime mover role*) sektor-sektor lain.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasar indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM) selama tahun 1999 dan 2002 mengalami perubahan. Pada tahun 1999 terdapat 9 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal, pada tahun 2002 hanya 3 kabupaten yang masih menjadi daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, dan Sumenep. Kabupaten Gresik, Madiun, dan Blitar adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang tinggi. Beberapa daerah di kawasan tapal kuda merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat pendapatan per kapita dan IPM yang rendah. Kawasan tapal kuda meliputi,

antara lain : kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Seluruh kota di Jawa Timur mempunyai nilai PDRB per kapita dan IPM yang tinggi.

Pola ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur selama satu dasa warsa terakhir adalah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan indeks ketimpangan Williamson dan Theil yang semakin besar.

Untuk mengurangi ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur, pembangunan hendaknya dilakukan dengan pendekatan regional dan sektoral. Pendekatan regional diprioritaskan pada daerah yang tertinggal. Anggaran pembangunan daerah pemerintah Jawa Timur harus diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal dan daerah tertinggal. Pendekatan sektoral dilakukan dengan mengembangkan sektor potensial atau sektor basisnya sebagai prioritas sektoral. Dengan mengembangkan sektor basis, maka diharapkan dapat sebagai penggerak utama sektor basis lainnya dan sektor non basis. Dengan demikian, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan spasial diharapkan dapat tercapai secara optimal antar kabupaten / kota di wilayah provinsi Jawa Timur.

*Kata kunci = Pola ketimpangan spasial  
antar kabupaten / kota*

---

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Airlangga  
SK Rektor Nomor : 2664/JO3/PP/2006  
Kontrak Nomor : 545/JO3.2/PG/20056  
Tanggal : 12 April 2006

**SUMMARY**  
**STRATEGY FOR SPATIAL INEQUALITY AMONG**  
**KABUPATEN/KOTA IN EAST JAVA PROVINCE**

(Nurul Istifadah, 2006, 49 pages)

The level of regional progressing is different, because they have differentially resources and redistribution income inequality from the centre government to the local government. Usually, Investor prefer to invest their capital in the cities where they have facilities, such as transportation, electricity networking, telecommunication, banking, insurance, and skill labor. (Kuncoro, 2004 : 127)

East Java Province is the biggest population density among others in Indonesia. Probably, inequality can be happened for among kabupaten / kota in East Java Province, because they have the differential resources and development output. The differentiating of development level among kabupaten / kota in East Java will have impact for differentially level of the regional welfare, and cause regional inequality higher than that one. In order that, it required classification of the kabupaten / kota di Jawa Timur based on economic fundamental indicator.

The fundamental indicator of regional economic is the riel condition of the regional economic such as : region economic growth, Gross Domestic Regional Bruto (GDRB) per capita, and Human Development Indeks (HDI) (Kuncoro, 2004 : 125).

This research is intended to know (1) how classified kabupaten / kota in East Java based on economic growth, income per capita, and Human Development Index (HDI), (2) based on the classification, we will know about the pattern of spatial inequality for the kabupaten / kota in East Java Province, (3) summarized strategy for spatial inequality among kabupaten / kota in East Java.

Researching for the pattern of spatial inequality of the kabupaten / kota in East Java use to make economic growth indicator, income per capita, and Human Development Index. And, to know spatial inequality among kabupaten / kota in

East Java used to make inequality index Williamson and entropi Theil. The larger Entropi Theil index, the greater the inequality, and Williamson index is too.

The result at regional typology based on three economic fundamental index was changed during the year 1993 until 2003. In 1993, the nine kabupaten / kotas was low economic growth, income per capita, and HDI. But, in 2003, only three kabupaten / kota low economic growth, income per capita, and HDI, such as Probolinggo, Bojonegoro, and Sumenep. Kabupaten Gresik, Madiun, dan Blitar was high economic growth, income per capita, and HDI. Several regions in tapal kuda region was low income per capita and HDI. Tapal kuda region such as : kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, and Situbondo. All of the kota in East Java have high of the number of income per capita and HDI.

The spatial inequality index between kabupaten / kota in East Java province during the yaer 1993 until 2003 increased. Actually, Williamson index and Theil index shows high, it means the inequality in East Java Province increase.

The East Java Province government should pay attention not only economic sectors aspect to make plan but it should consider regional aspect. However, there will be trade off between regional and economic sector aspect in the planning process. Also, the East Java Provinnce government must consider the regional aspect in allocating fund to each kabupaten / kota.

Using regional approach as well as economic sector approach in the process of development planning is intended to create efficient and effective development process in East Java Province. The economic development and equality will be obtained maximally through kabupaten / kota in East Java Province.

---

Funded by DIPA Airlangga University  
 Number of SK Rector : 2664/JO3/PP/2006  
 Number of Contract : 545/JO3.2/PG/2006  
 Date : 12 April 2006



## KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semuanya itu adalah kehendakNya dan tidak lepas dari dorongan, pengertian, dan kesabaran beberapa pihak. Untuk itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini :

1. Bapak Prof. DR. H. Sarmanu M.S, sebagai ketua LPPKM Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
2. Bapak Drs. Ec. Karjadi Mintaroem, M.Si., sebagai Dekan FE Unair, yang telah memberikan fasilitas untuk pelaksanaan penelitian ini.
3. Bapak dan Ibu pegawai kantor Statistik Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam menyediakan data yang sangat berguna untuk hasil penelitian ini.
4. Prof. Soedjono Abipraja, atas masukannya yang berharga untuk finalisasi penelitian ini.
5. Suami saya mas Andrys, anandaku Airlangga Kharisma Bijaksana, Airlando Kreatif Bestara, dan Angelinasyarga Sutera Dewangga, yang telah dengan sabar dan mengerti di saat penulis berada di depan komputer. Mereka adalah penyemangat saya dan inspirator saya.
6. serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah langsung maupun tidak langsung membantu proses penelitian ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan terus menerus. Oleh karena itu saran dan kritik membangun akan diterima dengan tangan terbuka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, masyarakat, dan pemerintah Jawa Timur untuk peningkatan pembangunan daerah di Jawa Timur

Surabaya, September 2006

Penyusun

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Penelitian Terdahulu .....	5
2.2 Landasan Teori .....	5
2.2.1 Indikator Fundamental Ekonomi Daerah .....	5
2.2.2 Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah .....	13
2.3 Kerangka Konsep .....	16
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	17
3.1 Tujuan Penelitian .....	17
3.2 Manfaat Penelitian .....	17
BAB IV METODE PENELITIAN .....	18
4.1 Pendekatan Penelitian .....	18
4.2 Definisi Operasional .....	19
4.3 Sumber Data .....	21
4.4 Teknik Analisis Data .....	21
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	24
5.1 Kondisi Daerah Dan Gambaran Pembangunan Ekonomi Jawa Timur .....	24
5.2 Pola Klasifikasi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	29
5.3 Pola Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten / Kota Di Jawa Timur .....	38
5.4 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten Kota Di Jawa Timur: Implikasi Dan Kebijakan .....	42

ii

<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
<b>6.1 Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>6.2 Saran-Saran .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>49</b>

x

## DAFTAR TABEL

1.1	Tipologi Daerah dengan Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita .....	8
1.2	Tipologi Daerah dengan Kriteria PDRB per Kapita dan IPM .....	8
1.3	Tipologi Daerah dengan Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan IPM .....	9
5.1	PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia Tahun 1995 – 2003 .....	27
5.2	Klasifikasi Kabupaten / Kota di Jawa Timur Berdasar Kriteria Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan IPM Tahun 1999 .....	36
5.3	Klasifikasi Kabupaten / Kota di Jawa Timur Berdasar Kriteria Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan IPM Tahun 2002 .....	37
5.4	Indeks Williamson dan Indeks Theil Provinsi Jawa Timur Tahun 1993 – 2003 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

5.1	Kontribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Terhadap PDB Nasional Tahun 1994 – 2003 .....	28
5.2	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1994 – 2003 .....	29
5.3	Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur (dalam %) Tahun 1994 – 2002 .....	31
5.4	Pendapatan Per Kapita Propinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) Tahun 1993 – 2003 .....	31
5.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 1996, 1999, 2002, 2003, dan 2004 .....	32
5.6	Grafik Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 1993 – 2003 .....	41
5.7	Grafik Indeks Theil Provinsi Jawa Timur Tahun 1993 – 2000 .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

1	Riwayat Hidup Ketua Peneliti .....	49
2	Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi, Tahun 1990-2003.....	50
3	PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga yang Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 – 2003 .....	51
4	Distribusi PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga yang Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan Tahun 1993 – 2003 (Juta Rp) .....	52
5	PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1993 – 2003 .....	53
6	PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1993 – 2003 .....	54
7	Distribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1993 – 2003 .....	55
8	Distribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1993 – 2003 .....	56
9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (dalam %) Tahun 1994 – 2002 .....	57
10	PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Ribu Rp), Menurut Kabupaten / Kota, Tahun 1993 – 2002.....	58
11	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten / Kota Tahun 1996, 1999, 2002 .....	59

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004 : 127).

Pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta harus pula mampu menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Bagaimana suatu daerah dapat mencapai tujuan tersebut, sangat ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih.

Data empiris menunjukkan bahwa pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber daya yang dimiliki. Adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik,

jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja yang terampil dapat semakin memperlebar ketidakseimbangan antar daerah. Demikian pula adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004 : 127).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia tidak hanya tampak pada perekonomian antar pulau di Indonesia (Jawa dan Luar Jawa), tetapi juga antar Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin), bahkan antar daerah dengan lingkup yang lebih kecil, seperti provinsi dan kabupaten / kota.

Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar di antara provinsi lain di Indonesia, merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antar kabupaten / kotanya. Hal itu karena adanya perbedaan kondisi sumber daya dan hasil pembangunan. Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi di antara kabupaten / kota di Jawa Timur akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, sehingga menyebabkan ketimpangan spasial antar daerah semakin besar.

Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur perlu terlebih dulu mengklasifikasikan masing-masing kabupaten / kota tersebut berdasar indikator-indikator fundamental ekonomi. Indikator fundamental ekonomi daerah pada hakekatnya merupakan indikator yang mencerminkan kondisi riil ekonomi daerah yang meliputi : pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kuncoro, 2004 : 125). Pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan rumus :



$(PDRB_t - PDRB_{t-1})/PDRB_{t-1} \times 100\%$ , dimana  $PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t;  $PDRB_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1. Dan, pendapatan per kapita (Ycap) dihitung dengan rumus :  $PDRB /$  jumlah penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan dari tiga indikator, yaitu *longevity* (harapan hidup), *knowledge* (pengetahuan), dan *decent standard of living* (standar hidup layak). Indikator *knowledge* diukur dari kombinasi melek huruf penduduk dewasa (berbobot tiga perempat) dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga). Dan, indikator standar hidup layak diukur oleh PDRB riil per kapita yang dinyatakan dalam *purchasing power parity* (PPP).

Dengan mengetahui klasifikasi daerah berdasar ketiga indikator ekonomi tersebut, maka akan terbentuk suatu gambaran seperti yang dikemukakan oleh Perraoux (1988) bahwa pertumbuhan tidak akan terjadi di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Glasson, 1990 : 153). Dengan demikian, pembangunan tidak merata di semua daerah, sehingga akan timbul ketimpangan.

Berdasar latar belakang di atas, maka merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk melakukan suatu penelitian yang mendalam tentang pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasar indikator fundamental ekonominya serta menganalisis ketimpangan spasial dengan menghitung indeks ketimpangannya. Dalam penelitian ini, indeks ketimpangan diukur dengan

menggunakan indeks Theil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Jawa Timur dalam merencanakan pengalokasian dana pembangunannya untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunannya dengan menetapkan strategi penanggulangan ketimpangan antar kabupaten / kota agar dapat tepat sasaran pada daerah yang relatif tertinggal.

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) ?
2. Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas, bagaimana pola ketimpangan spasial yang terjadi antar kabupaten / kota di Jawa Timur ?
3. Berapa indeks ketimpangan spasial pada masing-masing kabupaten / kota di Jawa Timur ?
4. Bagaimana strategi penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten/ kota di Jawa Timur ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada tahun 1965, Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih "matang" dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas yang semakin berkurang dengan signifikan.

Penelitian tentang ketimpangan daerah juga pernah dilakukan oleh Kuncoro di Kabupaten Banyumas antara tahun 1993 – 2000 dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*). Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas yang disebabkan oleh konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.

#### **2.2 Landasan Teori**

##### **2.2.1 Indikator Fundamental Ekonomi Daerah**

Fundamental ekonomi daerah pada hakikatnya merupakan indikator yang mencerminkan kondisi riil ekonomi daerah, yang meliputi : pertumbuhan

ekonomi daerah, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index / HDI* (Kuncoro, 2004 : 125). Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasar indikator fundamental ekonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Kriteria pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita
  - a. daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)
  - b. daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)
  - c. daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)
  - d. daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)
2. Kriteria pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM)
  - a. daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi.
  - b. daerah dengan pendapatan per kapita tinggi namun IPM rendah.
  - c. daerah dengan IPM tinggi namun pendapatannya rendah.
  - d. daerah relatif tertinggal, baik dalam pendapatan per kapita dan IPM.
3. Kriteria pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM)
  - a. daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi.
  - b. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun IPM rendah.
  - c. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah namun IPM tinggi.
  - d. Daerah relatif tertinggal, baik dalam pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Disebut “tinggi” apabila indikator fundamental ekonomi di suatu daerah lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh daerah. Disebut “rendah” apabila

indikator fundamental ekonomi di suatu daerah lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh daerah.

Tipologi daerah berdasar kriteria pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal. Dari kriteria tersebut, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu (Hill, 1989; Kuncoro, 2004) :

1. daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)
2. daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)
3. daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)
4. daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Pertumbuhan ekonomi dalam konteks daerah dihitung dengan rumus :

$$\text{Rog} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

dimana :

- Rog = pertumbuhan ekonomi daerah
- PDRB<sub>t</sub> = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke-t
- PDRB<sub>t-1</sub> = Produk Domestik regional Bruto tahun ke t-1

Sedangkan pendapatan per kapita dihitung dengan rumus PDRB dibagi dengan jumlah penduduk.

Tabel 1.1

## Tipologi Daerah dengan Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita (y)	(y <sub>i</sub> > y)	(y <sub>i</sub> < y)
Laju Pertumbuhan (r)		
(r <sub>i</sub> > r)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
(r <sub>i</sub> < r)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Keterangan :

- r : rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah
- y : rata-rata PDRB per kapita daerah
- r<sub>i</sub> : pertumbuhan ekonomi daerah i
- y<sub>i</sub> : PDRB per kapita daerah i

Tipologi daerah berdasar kriteria PDRB per kapita dan IPM adalah dengan menentukan rata-rata IPM sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Dari kriteria tersebut, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu (Kuncoro, 2004) :

1. daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi.
2. daerah dengan pendapatan per kapita tinggi namun IPM rendah.
3. daerah dengan pendapatan per kapitanya rendah namun IPM tinggi.
4. daerah relatif tertinggal, baik dalam pendapatan per kapita dan IPM.

Tabel 1.2

## Tipologi Daerah dengan Kriteria PDRB per Kapita dan IPM

PDRB per Kapita (y)	IPM	(IPM <sub>i</sub> > IPM)	(IPM <sub>i</sub> < IPM)
(y <sub>i</sub> > y)		Pendapatan tinggi dan IPM tinggi	Pendapatan rendah dan IPM tinggi
(y <sub>i</sub> < y)		Pendapatan tinggi dan IPM rendah	Pendapatan rendah dan IPM rendah

Keterangan :

- IPM : rata-rata indeks pembangunan manusia
- y : rata-rata PDRB per kapita daerah
- IPM<sub>i</sub> : indeks pembangunan manusia daerah i
- y<sub>i</sub> : PDRB per kapita daerah i

Tipologi daerah berdasar kriteria pertumbuhan ekonomi dan IPM adalah dengan menentukan rata-rata IPM sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu horizontal. Dari kriteria tersebut, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu (Kuncoro,2004) :

1. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi.
2. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun IPM rendah.
3. Daerah dengan IPM tinggi namun pertumbuhannya rendah.
4. Daerah relatif tertinggal, baik dalam pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Tabel 1.3

Tipologi Daerah dengan Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dan IPM.

Laju Pertumbuhan ( $r$ ) \ IPM	(IPMi > IPM )	(IPMi < IPM )
( $r_i > r$ )	Pertumbuhan tinggi dan IPM tinggi	Pertumbuhan tinggi dan IPM rendah
( $r_i < r$ )	Pertumbuhan rendah dan IPM tinggi	Pertumbuhan rendah dan IPM rendah

Keterangan :

- $r$  : rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah
- IPM : rata-rata indeks pembangunan manusia daerah
- $r_i$  : pertumbuhan ekonomi daerah  $i$
- IPMi : indeks pembangunan manusia daerah  $i$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan dari tiga indikator (Kuncoro, 2004 : 118-119):

1. *longevity*, sebagai ukuran harapan hidup
2. *knowledge* (pengetahuan), yang diukur dengan kombinasi melek huruf penduduk dewasa (berbobot dua per tiga) dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga)

3. dan standar hidup layak (*decent standard of living*) sebagaimana diukur oleh PDB riil per kapita dan dinyatakan dalam *purchasing power parity* (PPP).

Komponen *longevity* diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup. Harapan hidup diukur dengan menggunakan metode tidak langsung berdasarkan variabel rata-rata jumlah kelahiran hidup dan jumlah rata-rata anak yang tetap hidup.

Komponen pengetahuan (*knowledge*) diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu tingkat melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Indikator melek huruf dimaksudkan sebagai jumlah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebagai persentase terhadap total jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan penduduk berusia 15 tahun atau lebih, yang dihitung dengan memasukkan dua variabel yaitu : gelar yang telah dicapai dan pencapaian tingkat pendidikan (*attainment of education level*).

Komponen standar hidup layak (*decent standard of living*) diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi riil per kapita yang disesuaikan. UNDP memakai PDB per kapita dengan perhitungan paritas daya beli (PPP US\$) sebagai perbandingan internasional komponen ini. Prosedur untuk menghitung konsumsi riil per kapita yang disesuaikan adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004):



1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari data SUSENAS untuk setiap propinsi dan kabupaten / kota (=A)
2. Mendeflasi nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) provinsi dan kabupaten / kota (=B), dengan beberapa penyesuaian untuk kabupaten / kota dimana data harga tidak terkumpul.
3. Menghitung paritas daya beli per unit (PPP/unit) dengan menggunakan Jakarta sebagai standar. Penghitungan PPP/unit pada dasarnya memakai metode yang sama seperti yang digunakan dalam Proyek Perbandingan Internasional dalam standarisasi PDB untuk perbandingan internasional. Penghitungan berdasarkan harga dan jumlah 27 komoditas terpilih seperti yang tersedia dalam modul konsumsi SUSENAS.
4. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C)
5. Menyesuaikan nilai C dengan menerapkan formula Atkinson untuk mengukur nilai utilitas marginal C.

PPP/unit dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{PPP/unit} = \frac{(\sum E_{(i,j)})}{(\sum P_{(i,j)} * Q_{(i,j)})}$$

dimana :

$E_{(i,j)}$  = pengeluaran untuk komoditas ke-j pada provinsi ke-i

$P_{(i,j)}$  = harga komoditas j di Jakarta

$Q_{(i,j)}$  = jumlah komoditas j (unit) yang dikonsumsi di provinsi ke-i

Indeks tiga komponen HDI dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum, atau secara singkat dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{[X(i) - X(i)_{\min}]}{[X(i)_{\max} - X(i)_{\min}]}$$

dimana :

$X_{(i)}$  = indikator ke-i (1,2,3)

$X_{(i)_{\max}}$  = nilai maksimum  $X_{(i)}$

$X_{(i)_{\min}}$  = nilai minimum  $X_{(i)}$

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen IPM adalah :

- Harapan hidup kelahiran : 25 – 85 (standar UNDP)
- Tingkat melek huruf : 0 – 100 (standar UNDP)
- Rata-rata lama sekolah : 0 – 15 (standar UNDP)
- Konsumsi per kapita yang disesuaikan : 300.000 – 732.720

Berdasar prosedur di atas, IPM dapat dihitung dengan persamaan :

$$\text{IPM} = 1/3 [ X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)} ]$$

dimana :

$X_{(1)}$  = indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$  = indeks pendidikan

= 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah).

$X_{(3)}$  = indeks standar hidup layak / paritas daya beli



### 2.2.2 Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Adanya heterogenitas dan beragamnya karakteristik suatu daerah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan (Myrdal : 1957; Kuncoro : 2004).

Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah juga disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki. Adanya kecenderungan investor memilih berinvestasi di daerah perkotaan atau daerah yang sudah maju dari pada daerah yang terbelakang, disebabkan karena daerah yang maju memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja yang terampil. Sedangkan daerah yang terbelakang memiliki keterbatasan sarana prasarana tersebut. Sehingga apabila investor menanamkan investasinya di daerah terbelakang, maka harus mengeluarkan modal yang lebih besar untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana.

Kuznets yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa, pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun

pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (Kuznets, 1955; Todaro 2000; Kuncoro, 2004). Konsepsi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva U-terbalik dari Kuznets. Ardani (1992; Kuncoro 2004) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Untuk mengetahui besarnya ketimpangan suatu daerah dihitung dengan menggunakan indeks Williamson dan indeks Entropi Theil. Indeks entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri.

Rumus indeks ketimpangan Williamson adalah :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 P_i / P}}{Y}$$

dimana :

- IW = Indeks Williamson
- $Y_i$  = PDRB per kapita di kabupaten i
- Y = PDRB per kapita rata-rata tingkat propinsi
- $P_i$  = jumlah penduduk di kabupaten i
- P = jumlah penduduk provinsi

rumus indeks ketimpangan Entropi Theil adalah :

$$IT = \sum (Y_j/Y) \log \frac{(Y_j/Y)}{(P_j/P)}$$

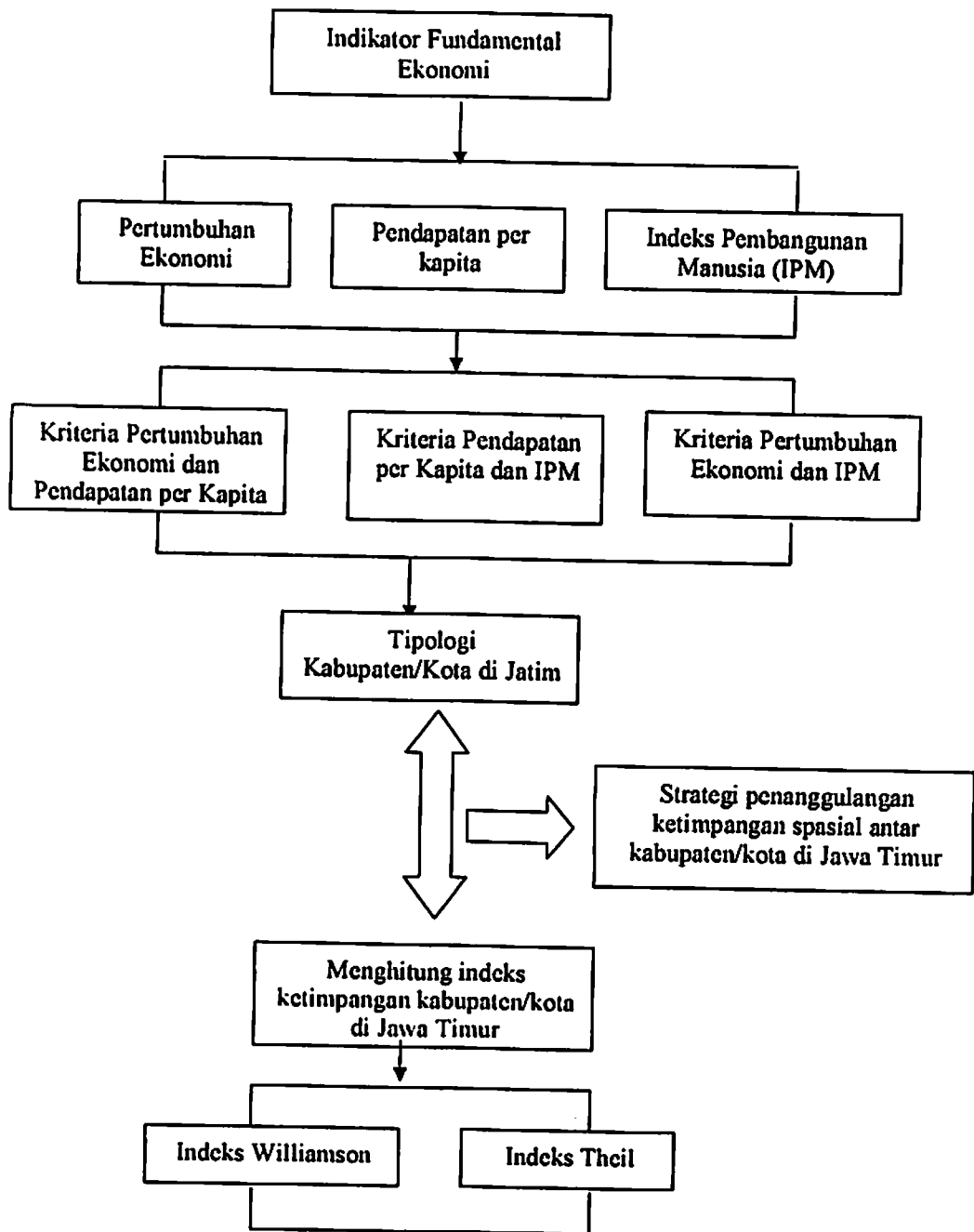
dimana :

- IT = indeks Entropi Theil
- Y<sub>j</sub> = PDRB per kapita kabupaten j
- Y = rata-rata PDRB per kapita tingkat propinsi
- P<sub>j</sub> = jumlah penduduk kabupaten j
- P = jumlah penduduk tingkat provinsi

Indeks Williamson dan Entropi Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan tersebut dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil. Hal ini akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial.

Indeks Entropi Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Sedangkan apabila mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata. Demikian juga dengan indeks ketimpangan Williamson.

2.3 Kerangka Konsep



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasar indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Mengetahui pola ketimpangan spasial yang terjadi antar kabupaten / kota di Jawa Timur.
3. Menghitung indeks ketimpangan spasial masing-masing kabupaten / kota di Jawa Timur.
4. Merumuskan strategi penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur.

### **3.2 Manfaat Penelitian**

1. Dengan mengetahui identifikasi profil maupun klasifikasi daerah kabupaten / kota di Jawa Timur, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi investor untuk memilih lokasi investasi di Jawa Timur.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengambil kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah kabupaten tertinggal.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut, khususnya tentang ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tipologi daerah kabupaten / kota di Jawa Timur berdasarkan indikator fundamental ekonomi. Indikator fundamental ekonomi kabupaten / kota di Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan kriteria tersebut dapat diketahui daerah yang relatif maju, tertinggal dan sangat tertinggal.

Setelah mengetahui tipologi setiap kabupaten / kota berdasarkan kriteria fundamental ekonomi, kemudian dilakukan analisis ketimpangan spasial dengan menghitung besarnya ketimpangan masing-masing kabupaten / kota di Jawa Timur dengan memakai indeks ketimpangan Williamson dan indeks Theil.

Dengan melihat faktor-faktor : struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, pola tipologi daerah, serta hasil perhitungan indeks ketimpangan spasialnya, maka dapat dianalisis dan dirumuskan secara komprehensif strategi penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur.



#### 4.2 Definisi Operasional

Kriteria yang digunakan untuk menggolongkan tipologi daerah kabupaten / kota di Jawa Timur adalah dengan menggunakan kriteria pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dihitung dari kenaikan PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur per tahun, pendapatan per kapita adalah PDRB kabupaten /kota dibagi dengan jumlah penduduknya, dan IPM diperoleh dari gabungan indeks *longevity*, *knowledge*, dan standar hidup layak.

Dari ketiga kriteria tersebut terdapat beberapa tipologi daerah yang dapat digolongkan berdasarkan :

1. Kriteria pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita
  - a. daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)
  - b. daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)
  - c. daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)
  - d. daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)
2. Kriteria pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM)
  - a. daerah dengan pendapatan per kapita dan IPM yang tinggi.
  - b. daerah dengan pendapatan per kapita tinggi namun IPM rendah.
  - c. daerah dengan IPM tinggi namun pendapatan per kapitanya rendah.
  - d. daerah relatif tertinggal, baik dalam pendapatan per kapita dan IPM.
3. Kriteria pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM)
  - a. daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi.
  - b. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun IPM rendah.

- c. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah namun IPM tinggi.
- d. Daerah relatif tertinggal, baik dalam pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Disebut "tinggi" apabila indikator fundamental ekonomi di suatu kabupaten / kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten / kota di Jawa Timur. Disebut "rendah" apabila indikator fundamental ekonomi di suatu kabupaten / kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten / kota di Jawa Timur.

Perhitungan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil. Indeks ketimpangan Williamson dan indeks Theil tidak memiliki batas atas dan batas bawah.

- Daerah dikatakan mengalami ketimpangan yang semakin besar apabila indeks Theil dan indeks Williamsonnya semakin besar.
- Daerah dikatakan mengalami ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata apabila indeks Theil dan indeks Williamsonnya semakin mendekati nol.

Yang dimaksud dengan Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kota, yaitu :

Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto,  
Madiun, Surabaya.

#### 4.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kantor Statistik provinsi Jawa Timur dan beberapa instansi terkait. Data yang diperlukan meliputi antara lain : PDRB sektoral, PDRB kabupaten / kota, PDRB per kapita, IPM, luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan data lain yang diperlukan sebagai analisis. Lokasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur.

#### 4.4 Tehnik Analisis Data

Untuk mengetahui tipologi kabupaten / kota digunakan kriteria fundamental ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

dimana :

- $\text{PDRB}_t$  = Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota tahun ke-t
- $\text{PDRB}_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota tahun ke t-1

Pendapatan per kapita dihitung dengan rumus PDRB dibagi dengan jumlah penduduk., yaitu dengan rumus :

$$Y_{\text{kap}} = \frac{\text{PDRB kab/kota}}{\text{Penduduk kab/kota}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dari gabungan indeks *longevity*, *knowledge*, dan standar hidup layak. Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Statistik.

Untuk menganalisis ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur digunakan tehnik analisis indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil.

Rumus indeks ketimpangan Williamson adalah :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 P_i / P}}{Y}$$

dimana :

- IW = indeks Williamson
- $Y_i$  = PDRB per kapita di kabupaten / kota i
- Y = PDRB per kapita rata-rata tingkat provinsi Jawa Timur
- $P_i$  = jumlah penduduk di kabupaten / kota i
- P = jumlah penduduk provinsi Jawa Timur

rumus indeks ketimpangan Entropi Theil adalah :

$$IT = \sum (Y_j/Y) \log \frac{(y_j/Y)}{(P_j/P)}$$

dimana :

- IT = indeks Entropi Theil
- $Y_j$  = PDRB per kapita kabupaten / kota j
- $Y$  = rata-rata PDRB per kapita tingkat provinsi Jawa Timur
- $P_j$  = jumlah penduduk kabupaten / kota j
- $P$  = jumlah penduduk tingkat provinsi Jawa Timur

Indeks ketimpangan Williamson dan indeks Theil tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil, atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Hal tersebut juga berlaku untuk hasil perhitungan dengan Indeks entropi Theil.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Kondisi Daerah dan Gambaran Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Kepulauan di Indonesia yang paling banyak penduduknya adalah pulau Jawa. Pulau Jawa menempati hampir 60% penduduk di Indonesia yang berjumlah lebih dari 215 juta jiwa pada tahun 2003, disusul Sumatera kurang lebih 20%, dan Kalimantan lebih dari 5%.

Dari 60% penduduk Indonesia yang berada di pulau Jawa, sebagian besar terkonsentrasi hanya di beberapa provinsi saja. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan tiga provinsi yang paling banyak penduduknya di pulau Jawa.

Apabila ditinjau dari kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk di pulau Jawa pada tahun 2003 sebesar 997 jiwa/m<sup>2</sup>, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 157 jiwa/km<sup>2</sup>, serta pulau Sumatera sebesar 93 jiwa/km<sup>2</sup>. Selebihnya adalah tersebar di beberapa kepulauan lainnya dengan tingkat kepadatan yang rendah. DKI Jakarta menempati urutan sebagai provinsi terpadat di pulau Jawa bahkan di Indonesia. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta hampir 13.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, kepadatan penduduk di provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, serta Banten adalah lebih dari 1.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Jawa Timur sebesar 756 jiwa/ pada tahun 2003.

Dari gambaran kondisi daerah dan kependudukan di atas, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang relatif besar di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga permasalahan di Jawa Timur, baik yang menyangkut bidang kependudukan, perekonomian, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadi permasalahan yang strategis di tingkat nasional (lihat Tabel pada Lampiran 2). Dengan demikian upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional hendaknya juga memperhatikan indikator-indikator perkembangan perekonomian di Jawa Timur.

Gambaran tentang indikator perkembangan perekonomian di Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB dan atau PDRB per kapita. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar diantara delapan sektor lainnya, disusul kemudian sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pertanian. Besarnya peran sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel & restoran disebabkan karena peranan kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur yang merupakan *growth pole* dari kawasan *hinterland* Gerbangkertasusila dan merupakan pintu gerbang perekonomian kawasan Indonesia Timur. PDRB Surabaya memberikan sumbangan terbesar di antara kabupaten/kota lainnya. Menyusul kemudian PDRB kabupaten Sidoarjo dan kota Kediri. Kedua kabupaten/kota tersebut merupakan daerah konsentrasi perindustrian di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki industri rokok besar berskala nasional dan internasional, yaitu Gudang Garam. Sedangkan kabupaten Sidoarjo merupakan daerah *hinterland* kota Surabaya yang paling berkembang. (lihat Tabel lampiran 5 dan 6).

Namun demikian, apabila dianalisis lebih jauh secara sektoral selama satu dasawarsa terakhir, bahwa pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel & restoran adalah yang paling tinggi dibandingkan sektor pertanian dan industri pengolahan, yaitu sebesar 1,32%. Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tumbuh dengan masing-masing minus (-) 1,40% dan minus (-) 0,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa di wilayah provinsi Jawa Timur mulai terjadi pergeseran peranan dari sektor industri pengolahan (dan pertanian) menuju sektor perdagangan (lihat Tabel Lampiran 4). Fenomena ini tidak selalu disebabkan oleh penurunan aktivitas perekonomian sektor industri pengolahan di Jawa Timur, tetapi dapat juga disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi sektor industri pengolahan di luar provinsi Jawa Timur. Untuk kepastian analisis ini tentu saja harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Sektor industri pengolahan tumbuh pesat di Jawa Timur sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, namun perannya dalam perekonomian terus menerus mengalami penurunan sejak tahun 1998. Sektor pertanian peranannya relatif konstan walaupun terjadi krisis ekonomi. Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat, walaupun pada saat krisis mengalami sedikit penurunan. Hal ini menguatkan peran Jawa Timur -- dengan Surabaya sebagai pusat kotanya -- sebagai daerah perdagangan dan pintu gerbang perdagangan Kawasan Indonesia Bagian Timur (Katimin). Dalam era perdagangan bebas dimana semakin longgarnya kesempatan barang-barang impor memasuki wilayah Indonesia (termasuk provinsi Jawa Timur), mendorong pesatnya pertumbuhan sektor



perdagangan di wilayah Jawa Timur. Rendahnya kemampuan bersaing produk-produk lokal semakin sulit menghadang derasny arus barang impor. Apabila hal ini tidak dicari jalan keluarnya, dalam jangka panjang akan mengganggu pertumbuhan industri dalam negeri dan kesempatan kerja akibat melambatnya proses produksi dalam negeri.

**Tabel 5.1**  
**PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia, Tahun 1995 – 2003**

Tahun	PDB Atas Dasar Harga Berlaku			PDB Atas Dasar Harga Konstan		
	Jawa Timur (ribu rp)	Nasional (ribu rp)	% PDRB Jatim thd PDB Nasional	Jawa Timur (ribu rp)	Nasional (ribu rp)	% PDRB Jatim thd PDB Nasional
1994	57.146.453	382.219.724	14,95	52.727.481	354.640.751	14,87
1995	65.883.193	454.514.150	14,50	57.040.504	383.792.330	14,86
1996	87.696.557	532.630.820	16,46	61.752.469	413.797.915	14,92
1997	88.772.383	627.695.519	14,14	64.853.576	433.245.879	14,97
1998	135.753.197	955.753.476	14,20	54.398.897	376.374.853	14,45
1999	150.555.746	1.099.731.598	13,69	55.058.970	379.352.473	14,51
2000	169.680.628	1.264.918.748	13,41	56.856.521	398.016.853	14,28
2001	195.762.784	1.467.654.835	13,34	58.750.180	411.753.484	14,27
2002*	226.957.307	1.610.564.951	14,09	60.754.056	426.942.936	14,23
2003**	254.380.758	1.786.690.919	14,24	63.252.166	444.453.474	14,23

Sumber : Statistik Indonesia 2003, disusun dan diolah kembali.

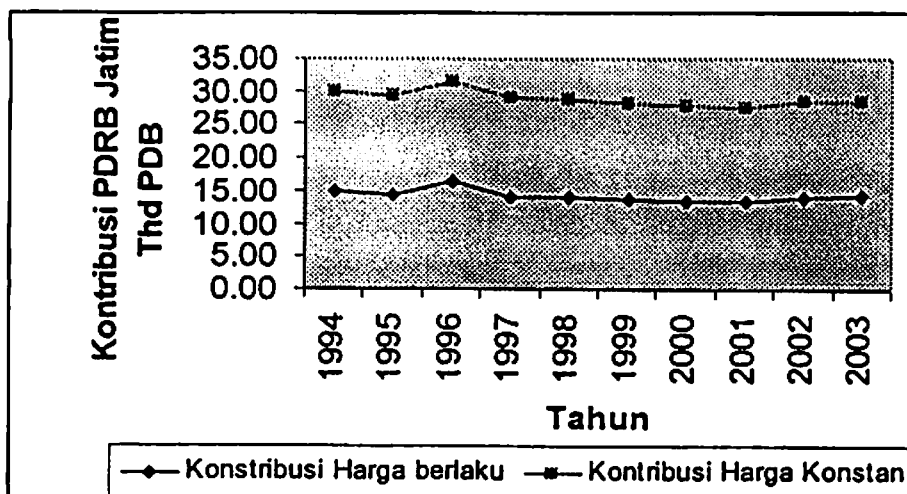
\*) angka sementara, \*\*) angka sangat sementara

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 di atas, proporsi PDRB Jawa Timur terhadap PDB Nasional atas dasar harga berlaku menunjukkan kondisi yang semakin menurun pada saat krisis ekonomi, dan berangsur-angsur meningkat pada masa pemulihan setelah krisis. Sedangkan apabila dilihat dari proporsi PDRB Jawa Timur terhadap PDB Nasional atas dasar harga konstan 1993 maka kontribusinya mengalami penurunan yang relatif sangat kecil. Secara rata-rata kontribusinya relatif stabil. Hal ini mengingat pada tahun tersebut hampir seluruh

daerah di Indonesia terkena dampak krisis ekonomi, tidak terkecuali provinsi Jawa Timur.

Gambar 5.1

Kontribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Terhadap PDB Nasional Tahun 1994 - 2003

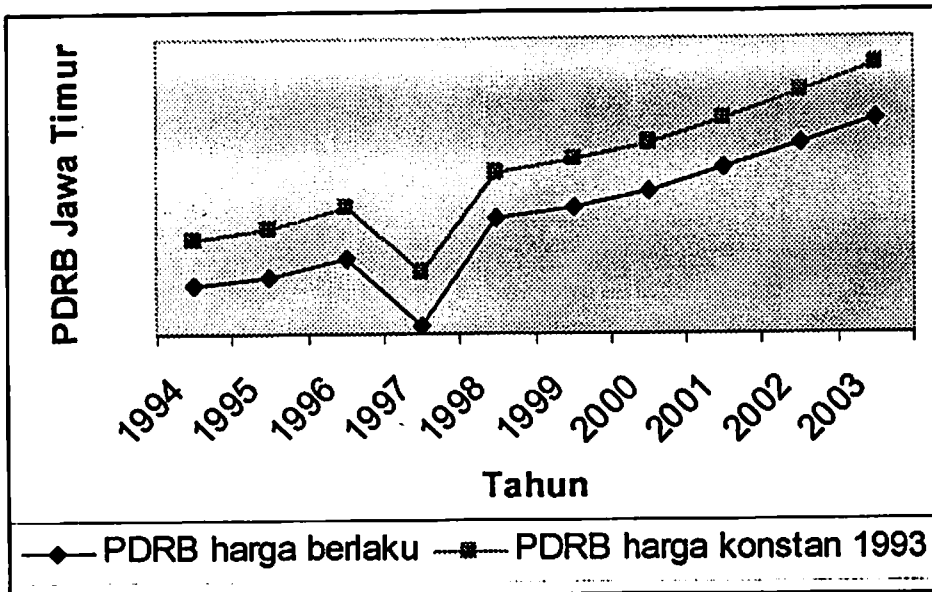


Sumber : Tabel 5.1, diolah kembali.

Besarnya PDRB Jawa Timur atas dasar harga yang berlaku nilainya lebih besar dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan tahun 1993 nilainya dipengaruhi oleh terjadinya inflasi / kenaikan harga dibandingkan dengan harga pada tahun 1993. Pada saat krisis ekonomi tahun 1997/1998, terjadi inflasi yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan turunnya nilai PDRB atas dasar harga konstan di Jawa Timur. Pada tahun tersebut PDRB Jawa Timur atas dasar harga berlaku juga mengalami penurunan akibat turunnya aktivitas produksi. Turunnya aktivitas ekonomi pada saat krisis ini diakibatkan oleh lemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya produksi akibat depresiasi rupiah terhadap USD.

Gambar 5.2

Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1994 - 2003



Sumber : Tabel 5.1, diolah kembali.

## 5.2 Pola Klasifikasi Kabupaten / Kota di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kriteria yang digunakan untuk menggolongkan tipologi masing-masing daerah kabupaten / kota di Jawa Timur adalah dengan indikator fundamental ekonomi daerah. Fundamental ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

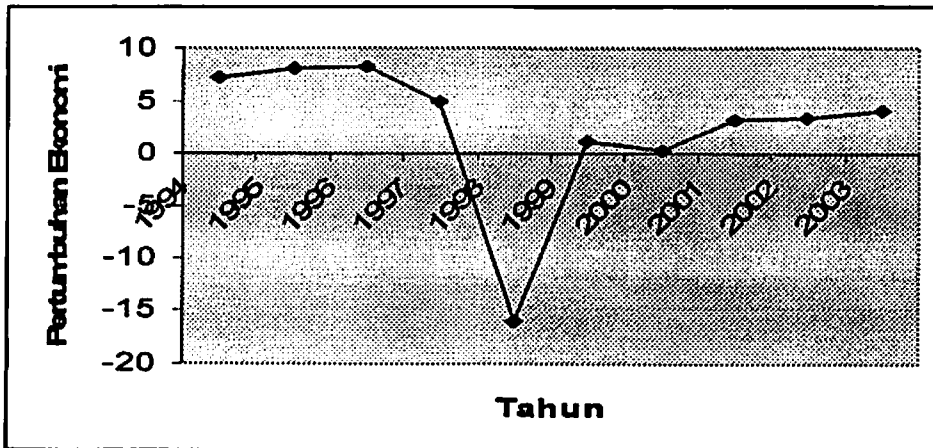
Sepanjang satu dasawarsa terakhir, provinsi Jawa Timur dan seluruh kabupaten / kota di Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin

meningkat. Namun demikian, pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998, semua kabupaten / kota di Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang negatif. Beberapa kabupaten / kota mengalami proses pemulihan ekonomi yang sangat berat. Kota Kediri yang semula mempunyai angka pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, setelah krisis ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Bahkan untuk tahun 2002 mengalami pertumbuhan yang negatif (-) 5,14%.

Kota Kediri mempunyai PDRB per kapita yang paling tinggi di antara kabupaten / kota lain di Jawa Timur, yaitu hampir mencapai 20 juta rupiah. Sedangkan urutan kedua adalah kota Surabaya dengan nilai lebih dari 5 juta rupiah. Besarnya PDRB per kapita di kota Kediri dikarenakan adanya pabrik rokok Gudang Garam sebagai pabrik rokok terbesar di Indonesia. Beberapa daerah lain yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi di Jawa Timur adalah kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Kabupaten Gresik dan Sidoarjo merupakan daerah *hinterland* ibukota Jawa Timur yaitu Surabaya. Gresik dan Sidoarjo memiliki kawasan industri (*industrial cluster*) yang berkembang. Kabupaten / kota di kawasan Gerbangkertosusila (kecuali Bangkalan dan Lamongan) memiliki nilai PDRB per kapita yang relatif tinggi akibat efek luberan (*spread effect*) dari pusat pertumbuhan kota Surabaya. Kabupaten / kota yang memiliki PDRB tinggi pada umumnya adalah daerah yang memiliki banyak industri dan sumber-sumber usaha yang mampu menghasilkan output besar. Delapan kota di Jawa Timur, kabupaten Gresik dan Sidoarjo merupakan daerah dengan nilai PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah.

Gambar 5.3

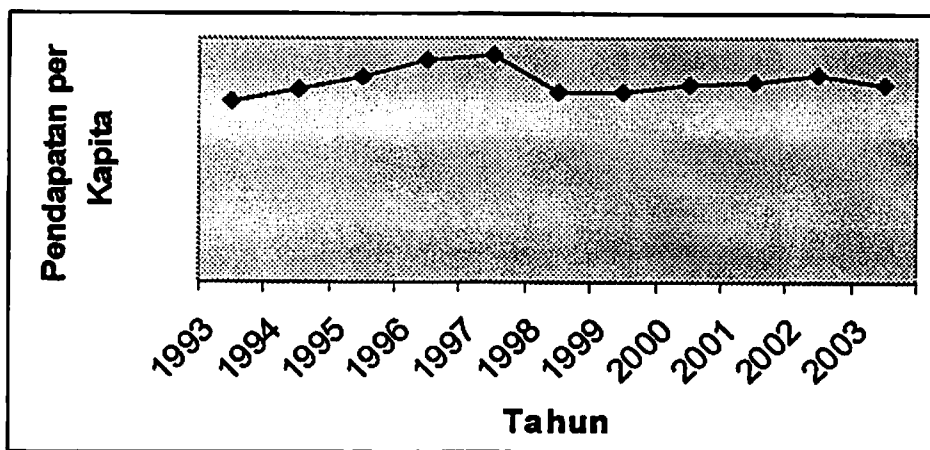
Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur (dalam %), Tahun 1994 – 2002



Sumber : Lampiran 9.

Gambar 5.4

Pendapatan Per Kapita Propinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah), Tahun 1993 – 2003.



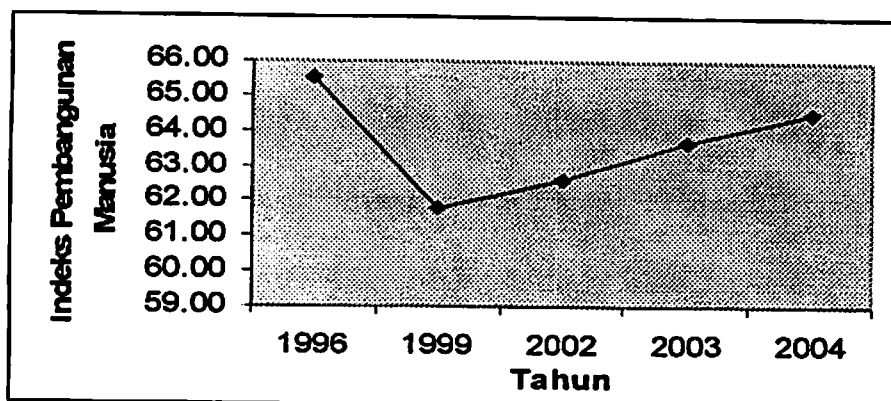
Sumber : Lampiran 10.

Disamping indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, ukuran pembangunan juga meliputi bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk

melengkapi kedua indikator ekonomi tersebut. Nilai IPM Jawa Timur mengalami penurunan pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Namun demikian, terus mengalami kenaikan pada saat proses pemulihan ekonomi. Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki IPM rendah adalah daerah Tapal Kuda, yang meliputi kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan serta daerah di kepulauan Madura. Kabupaten di kepulauan Madura tersebut adalah kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi, tidak serta merta memiliki nilai IPM yang tinggi. Atau sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pendapatan per kapita yang rendah memiliki nilai IPM yang rendah pula. Namun demikian, terdapat kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang sama-sama rendah. Daerah dengan kondisi demikian disebut dengan daerah yang tertinggal.

Gambar 5.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur  
Tahun 1996, 1999, 2002, 2003, dan 2004



Sumber : Lampiran II.

Hasil penggolongan kabupaten / kota di Jawa Timur dengan tiga indikator fundamental ekonomi daerah dirangkum dalam Tabel 5.2 dan 5.3. Tabel 5.2 mengikhtisarkan klasifikasi tipologi kabupaten / kota selama tahun 1999 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan regional setelah krisis ekonomi tahun 1998. kesimpulan dari table tersebut adalah :

- **Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, dan seluruh kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) merupakan daerah tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang rendah.**
- Kabupaten Nganjuk dan Madiun adalah daerah relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah, tetapi dengan IPM tinggi.
- Kabupaten Lumajang dan Jember Bondowoso, Tuban dan Lamongan (daerah tapal kuda) merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat pendapatan per kapita dan IPM yang rendah.
- Kabupaten Gresik, Madiun, dan Blitar adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang tinggi.
- Kota Kediri, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, dan Surabaya merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah namun memiliki PDRB per kapita dan IPM yang tinggi. Di kota-kota tersebut terdapat kawasan industri, sedangkan di Probolinggo banyak dihasilkan tembakau sebagai sektor andalan daerahnya.

- Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, , Mojokerto, Jombang, Magetan, dan Ngawi merupakan daerah yang mempunyai PDRB per kapita yang rendah, namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi.

Nilai rata-rata untuk indikator PDRB per kapita kabupaten / kota di Jawa Timur pada perhitungan di atas adalah relatif sangat tinggi. Hal ini karena adanya nilai PDRB per kapita kota Kediri yang 4 kali lebih besar dari Surabaya. Namun demikian, dalam perhitungan ini tetap memasukkan nilai PDRB kota Kediri.

Setelah 3 tahun proses pemulihan ekonomi berjalan, terdapat pergeseran pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur. Beberapa daerah yang semula sebagai daerah yang tertinggal, kemudian memiliki posisi klasifikasi yang lebih baik. Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan merupakan daerah tertinggal berdasar klasifikasi perhitungan setelah krisis, yaitu tahun 1999. Namun demikian pada tahun 2002 hanya 3 kabupaten saja di Jawa Timur yang merupakan daerah tertinggal. Hasil ringkasan tipologi kabupaten / kota berdasar 3 indikator fundamental ekonomi pada tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 5.3 :

- Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, dan Sumenep merupakan daerah tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang rendah.



- Kabupaten Pacitan, Magetan dan Ngawi adalah daerah relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah, tetapi dengan IPM tinggi.
- Kabupaten Ponorogo, Lumajang, Jember, dan Bondowoso (daerah tapal kuda), serta Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat pendapatan per kapita dan IPM yang rendah.
- Kabupaten Gresik, Blitar, dan Madiun merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang tinggi.
- Kota Kediri dan Malang, walaupun mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah namun memiliki IPM di atas rata-rata Jawa Timur dan PDRB serta PDRB per kapita yang tinggi.
- Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Tuban, dan Lamongan merupakan daerah yang mempunyai PDRB per kapita yang rendah, namun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi.

Tabel 5.2

Klasifikasi Kabupaten / Kota di Jawa Timur  
Berdasar Kriteria Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan IPM Tahun 1999

Kabupaten/Kota	Kriteria Pertumbuhan Ekn	Kriteria PDRB per Kapita	Kriteria IPM
Kabupaten			
Pacitan	tinggi	rendah	tinggi
Ponorogo	tinggi	rendah	rendah
Trenggalek	tinggi	rendah	tinggi
Tulungagung	tinggi	rendah	tinggi
Blitar	tinggi	rendah	tinggi
Kediri	tinggi	rendah	tinggi
Malang	tinggi	rendah	tinggi
Lumajang	tinggi	rendah	rendah
Jember	tinggi	rendah	rendah
<u>Banyuwangi</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
Bondowoso	tinggi	rendah	rendah
<u>Situbondo</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
<u>Probolinggo</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
<u>Pasuruan</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
Sidoarjo	rendah	tinggi	tinggi
Mojokerto	tinggi	rendah	tinggi
Jombang	tinggi	rendah	tinggi
Nganjuk	rendah	rendah	tinggi
Madiun	rendah	rendah	tinggi
Magetan	tinggi	rendah	tinggi
Ngawi	tinggi	rendah	tinggi
<u>Bolonegoro</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
Tuban	tinggi	rendah	rendah
Lamongan	tinggi	rendah	rendah
<u>Gresik</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
<u>Bangkalan</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
<u>Sampang</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
<u>Pamekasan</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
<u>Sumeneq</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
Kota			
Kediri	rendah	tinggi	tinggi
<u>Blitar</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
Malang	rendah	tinggi	tinggi
Probolinggo	rendah	tinggi	tinggi
Pasuruan	rendah	tinggi	tinggi
Mojokerto	rendah	tinggi	tinggi
<u>Madun</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
Surabaya	rendah	tinggi	tinggi
Batu			
<b>Jawa Timur</b>	—	—	—

Sumber : BPS Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

Tabel 5.3

**Klasifikasi Kabupaten / Kota di Jawa Timur  
Berdasar Kriteria Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan IPM Tahun 2002**

Kabupaten / Kota	Kriteria Pertumbuhan Ekonomi	Kriteria PDRB Per Kapita	Kriteria IPM
<b>Kabupaten</b>			
1 Pacitan	rendah	rendah	tinggi
2 Ponorogo	tinggi	rendah	rendah
3 Trenggalek	tinggi	rendah	tinggi
4 Tulungagung	tinggi	rendah	tinggi
5 Blitar	tinggi	rendah	tinggi
6 Kediri	tinggi	rendah	tinggi
7 Malang	tinggi	rendah	tinggi
8 Lumajang	tinggi	rendah	rendah
9 Jember	tinggi	rendah	rendah
10 Banyuwangi	tinggi	rendah	tinggi
11 Bondowoso	tinggi	rendah	rendah
12 Situbondo	tinggi	rendah	rendah
13 <u>Probolinggo</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
14 Pasuruan	rendah	tinggi	rendah
15 <u>Sidoarjo</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
16 Mojokerto	tinggi	rendah	tinggi
17 Jombang	tinggi	rendah	tinggi
18 Nganjuk	tinggi	rendah	tinggi
19 Madiun	tinggi	rendah	tinggi
20 Magetan	rendah	rendah	tinggi
21 Ngawi	rendah	rendah	tinggi
22 <u>Bojonegoro</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
23 Tuban	tinggi	rendah	tinggi
24 Lamongan	tinggi	rendah	tinggi
25 <u>Gresik</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
26 Bangkalan	tinggi	rendah	rendah
27 Sampang	tinggi	rendah	rendah
28 Pamekasan	tinggi	rendah	rendah
29 <u>Sumenep</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>	<u>rendah</u>
<b>Kota</b>			
30 Kediri	rendah	tinggi	Tinggi
31 <u>Blitar</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
32 Malang	rendah	tinggi	tinggi
33 <u>Probolinggo</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
34 <u>Pasuruan</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
35 <u>Mojokerto</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
36 <u>Madiun</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
37 <u>Surabaya</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>	<u>tinggi</u>
Jawa Timur	---	---	---

Sumber : BPS Jawa Timur, disusun dan diolah kembali.

Dari hasil penggolongan kabupaten / kota ke dalam beberapa tipologi daerah tersebut, maka dapat digunakan untuk membantu mengalokasikan dana

pembangunan dengan pendekatan regional kepada daerah tertinggal dan yang relatif tertinggal. Daerah tertinggal mempunyai prioritas utama untuk dibangun sehingga dapat mengurangi ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di wilayah provinsi Jawa Timur. Dengan melakukan tipologi daerah tersebut setiap tahun, maka akan dapat diketahui pergeseran kemampuan dan tipologi kabupaten / kota berdasar kriteria indikator fundamental ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

### 5.3 Pola Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten / Kota di Jawa Timur

Untuk menganalisis ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur digunakan tehnik analisis dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson dan indeks entropi Theil.

Rumus indeks ketimpangan Williamson adalah :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 P_i / P}}{Y}$$

dimana :

- IW = indeks Williamson
- Y<sub>i</sub> = PDRB di kabupaten / kota i
- Y = PDRB rata-rata tingkat provinsi Jawa Timur
- P<sub>i</sub> = jumlah penduduk di kabupaten / kota i
- P = jumlah penduduk provinsi Jawa Timur

Rumus indeks ketimpangan entropi Theil adalah :

$$IT = \sum (Y_j/Y) \times \log \frac{(Y_j/Y)}{(P_j/P)}$$

dimana :

- IT = indeks Theil
- $Y_j$  = PDRB kabupaten / kota j
- Y = PDRB tingkat provinsi Jawa Timur
- $P_j$  = jumlah penduduk kabupaten / kota j
- P = jumlah penduduk tingkat provinsi Jawa Timur

Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil, atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Hal tersebut juga berlaku untuk hasil perhitungan dengan indeks entropi Theil. Tidak ada patokan tentang besaran nilai indeks Williamson dan Theil untuk menunjukkan tingkat ketimpangan suatu daerah. Semakin besar nilai indeks Williamson atau Theil menunjukkan semakin besar ketimpangannya, demikian sebaliknya.

Besarnya indeks ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur dengan menggunakan tehnik analisis indeks Williamson maupun indeks Theil sepanjang tahun 1993 sampai dengan tahun 2003 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Indeks Williamson dan Indeks Theil Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 1993 – 2003**

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Theil
1993	0,4640	0,1628
1994	0,2370	0,1411
1995	0,0439	0,1487
1996	0,2713	0,1522
1997	0,4181	0,1583
1998	0,2085	0,1470
1999	0,2049	0,1430
2000	0,1125	0,1504
2001	0,0464	0,1531
2002	0,1123	0,1458
2003	0,2294	0,1476

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah kembali.

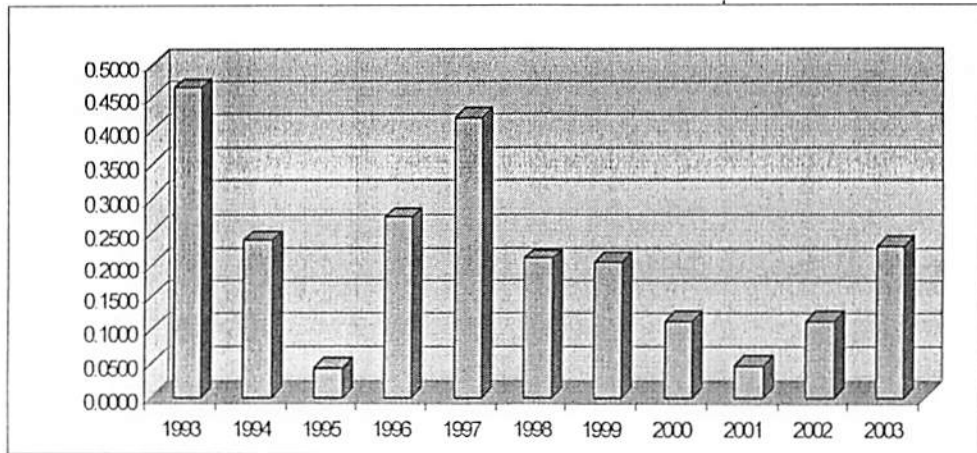
Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa indeks ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur selama tahun 1993 – 2003 dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson maupun indeks Theil menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur. Dengan melihat pada hasil pengklasifikasian kabupaten/kota berdasar fundamental ekonomi pada Bab 5.2, maka dengan adanya hasil klasifikasi beberapa kabupaten / kota sebagai daerah tertinggal, maka akan mendorong terjadinya ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur.

Dari hasil perhitungan indeks Williamson, terjadi penurunan nilai indeks pada tahun 2001. Pada tahun 2001 tersebut adalah tahun awal berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan bahwa

otonomi daerah mampu menurunkan tingkat ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur, perlu diteliti lebih lanjut.

Gambar 5. 6

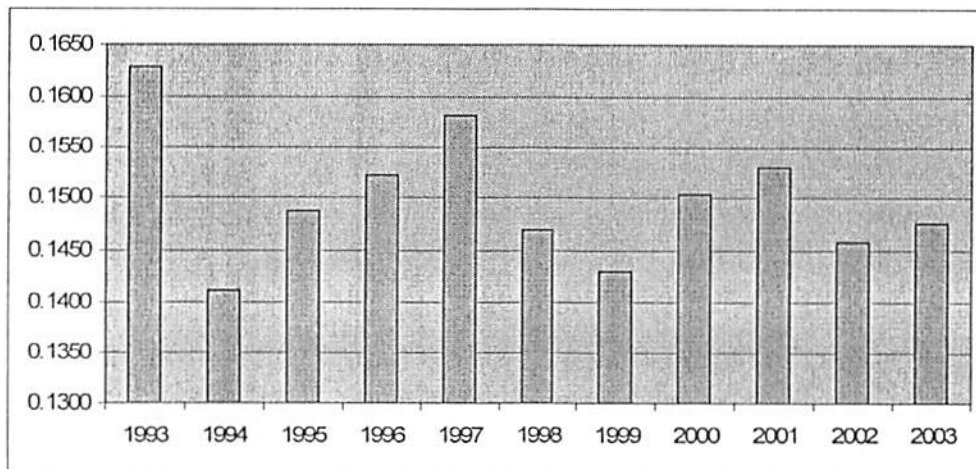
Grafik Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur, Tahun 1993 – 2003



Sumber : Tabel 5.4

Gambar 5.7

Grafik Indeks Theil Provinsi Jawa Timur, Tahun 1993 – 2000



Sumber : Tabel 5.4

Tinggi / rendahnya nilai indeks ketimpangan antar kabupaten / kota tidak secara otomatis menerangkan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur lebih buruk / baik dibandingkan dengan daerah lain. Indeks Williamson hanya menjelaskan besarnya PDRB per kapita yang didistribusikan antar kabupaten / kota di Jawa Timur tersebut terhadap rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten / kota atau di Jawa Timur. Namun demikian besaran indeks Williamson dan indeks Theil dapat digunakan sebagai indikator awal melihat ketidakmerataan pembangunan atau ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur. Ketimpangan pembangunan mengindikasikan adanya ketimpangan dalam kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, indeks ketimpangan ini tidak menjelaskan besarnya tingkat kesejahteraan antar masyarakat.

#### **5.4 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten / Kota di Jawa Timur : Implikasi dan Kebijakan**

Adanya heterogenitas dan beragamnya karakteristik suatu daerah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak pula pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional semakin besar. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan



(*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan (Myrdal : 1957; Kuncoro : 2004).

Berdasar hasil penelitian di atas, daerah kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur dapat digolongkan menjadi daerah kabupaten / kota yang maju dan yang terbelakang. Daerah yang maju adalah daerah yang masuk kategori daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan IPM yang tinggi. Seangkan daerah terbelakang adalah daerah tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan IPM yang rendah.

Agar keseimbangan antar daerah kabupaten / kota di Jawa Timur dapat terwujud, maka perencanaan pembangunan hendaknya diarahkan kepada daerah yang relatif tertinggal / terbelakang. Apabila pembangunan ekonomi dengan pendekatan regional diarahkan pada daerah yang tertinggal, maka akan menggeser tipe daerah tersebut ke dalam kategori daerah yang lebih maju. Sehingga akan semakin mengurangi ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur.

Untuk mengurangi ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur, pembangunan hendaknya dilakukan dengan pendekatan regional dan sektoral. Pendekatan regional diprioritaskan pada daerah yang tertinggal. Anggaran pembangunan daerah pemerintah provinsi Jawa Timur harus diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal dan daerah tertinggal. Pendekatan sektoral dilakukan dengan mengembangkan sektor potensial atau sektor basis sebagai prioritas sektoral. Dengan mengembangkan sektor basis sebagai sektor potensial, maka dapat sebagai penggerak utama sektor basis dan sektor non basis.

Jadi, dalam strategi pembangunannya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan mengenai pengalokasian dana pembangunan kepada Daerah kabupaten / kota hendaknya memperhatikan aspek regional disamping aspek sektoral, walaupun dalam kenyataannya seringkali timbul *trade off* antara tujuan pertumbuhan ekonomi sektoral dan aspek pemerataan regional. Dengan memprioritaskan pada daerah tertinggal dan mengembangkan spesialisasi sektoral pada masing-masing kabupaten / kota diharapkan seluruh daerah di Jawa Timur dapat tumbuh bersama dengan bertumpu pada sektor spesialisasi sebagai sektor penggerak utama.

Dengan demikian, langkah yang tepat dalam perencanaan daerah di Jawa Timur adalah dengan mempertimbangkan, baik dengan pendekatan sektoral maupun regional sebagai prioritas alokasi dana, yaitu dengan mempertimbangkan tipologi kabupaten / kota berdasar ketiga kriteria fundamental ekonomi : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Pendekatan sektoral adalah dengan mengembangkan sektor basis sebagai sektor potensial dan penggerak utama (*prime mover role*) sektor-sektor yang lain. Sedangkan pendekatan regional diarahkan pada daerah yang relatif tertinggal.

Perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan sektoral dan regional diharapkan dapat menciptakan pembangunan di Jawa Timur yang optimal dan merata dengan hasil yang efisien dan efektif. Dengan demikian, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan spasial diharapkan dapat tercapai secara optimal antar kabupaten / kota di wilayah provinsi Jawa Timur.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasar indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM) selama tahun 1999 dan 2002 mengalami perubahan.
  - Pada tahun 1999 terdapat 9 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal, pada tahun 2002 hanya 3 kabupaten yang masih menjadi daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, dan Sumenep.
  - Kabupaten Gresik, Madiun, dan Blitar adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang tinggi.
  - Beberapa daerah di kawasan tapal kuda merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat pendapatan per kapita dan IPM yang rendah. Kawasan tapal kuda meliputi, antara lain : kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo.
  - Seluruh kota di Jawa Timur mempunyai nilai PDRB per kapita dan IPM yang tinggi.
2. Pola ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur adalah cenderung mengalami peningkatan nilai indeks ketimpangan spasial, baik dihitung dengan indeks Williamson maupun indeks Theil. Hal ini dapat

diartikan bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur selama satu dasa warsa terakhir (tahun 1993 – 2003).

3. Strategi penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menggolongkan daerah kabupaten / kota ke dalam tipologi daerah maju dan daerah terbelakang berdasar pendekatan fundamental ekonomi daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM.
- Agar keseimbangan antar daerah kabupaten / kota di Jawa Timur dapat terwujud, maka perencanaan pembangunan hendaknya diarahkan kepada daerah yang relatif tertinggal / terbelakang.
- Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan mengenai pengalokasian dana pembangunan kepada daerah kabupaten / kota hendaknya memperhatikan aspek regional disamping aspek sektoral, walaupun dalam kenyataannya seringkali timbul *trade off* antara tujuan pertumbuhan ekonomi sektoral dan aspek pemerataan regional.
- Langkah selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan prioritas pengalokasian dana, baik dengan pendekatan sektoral maupun regional. Pendekatan regional diprioritaskan pada daerah yang tertinggal. Pendekatan sektoral dilakukan dengan mengembangkan sektor potensial atau sektor basis sebagai prioritas sektoral, yang merupakan penggerak utama (*prime mover role*) sektor-sektor lainnya.

## 6.2 Saran

Untuk mengurangi ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur, pembangunan hendaknya dilakukan dengan pendekatan regional dan sektoral. Perencanaan pembangunan dengan menggunakan strategi pendekatan sektoral dan regional diharapkan dapat menciptakan pembangunan di Jawa Timur yang optimal dan merata dengan hasil yang efisien dan efektif.

Pendekatan regional diprioritaskan pada daerah yang tertinggal. Anggaran pembangunan daerah pemerintah Jawa Timur harus diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal dan daerah tertinggal. Pendekatan sektoral, yaitu dengan mengembangkan sektor potensial atau sektor basisnya sebagai prioritas sektoral. Dengan mengembangkan sektor basis, maka diharapkan dapat sebagai penggerak utama sektor basis lainnya dan sektor non basis.

Dengan memprioritaskan pada daerah tertinggal dan mengembangkan spesialisasi sektoral pada masing-masing kabupaten / kota, diharapkan seluruh daerah di Jawa Timur dapat tumbuh bersama dengan melakukan prioritas pada sektor spesialisasi sebagai penggerak utama. Dengan demikian, langkah yang tepat dalam perencanaan daerah di Jawa Timur adalah dengan mempertimbangkan, baik dengan pendekatan sektoral maupun regional sebagai prioritas alokasi dana. Dengan demikian, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan spasial diharapkan dapat tercapai secara optimal antar kabupaten / kota di wilayah provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro, 2004, *Sectoral Decomposition of Regional Income Inequality in Indonesia a Comparison with Postwa Japan*, makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Regional Science Association (IRSA), 18-19 Juli 2003, Bandung
- Amstrong, Harvey and Taylor, Jim, 2001, *Regional Economic and Policy*, Blackwell Publihers Ltd, United Kingdom.
- Aziz, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*, Bibliografi, LPFE-UI, Jakarta.
- Boediono, 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Glasson, John, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, terjemahan, edisi kedua, LPFE-UI, Jakarta.
- Jhingan, 1996, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kadariah, 1982, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Analisis Spasial dan Regional*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi. Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rahardja, Prathama, dan Manurung, Mandala, 2001, *Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar*, LPFE-UI, Jakarta.
- Richardson, Harry W, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, LPFE-UI, terjemahan, Jakarta.
- Utomo, Ariane J., 2004 *Ealth Inequality and Growth : How Relevant is Wealth Inequality in Post Soeharto's Policy Making Context in Indonesia ?*, makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Regional Science Association (IRSA), 18-19 Juli 2003, Bandung.

## Lampiran 1

## Riwayat Hidup Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap : Nurul Istifadah, S.E.,M.Si.
2. Umur / Jenis kelamin / Agama : 39 tahun / Perempuan / Islam
3. A l a m a t : Klampis Semolo Barat III/ i-10 Surabaya
4. Pangkat / Golongan / NIP : Penata Muda Tk I/ IIIb / 132 205 435
5. Jabatan pokok : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4 Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi :
  - Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1993.
  - Ilmu Manajemen, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2005.
9. Pengalaman Penelitian :
  - a. Pekerja Wanita Di Perusahaan PMA (Suatu Studi Di Kotamadya Surabaya), 2000.
  - b. Analisa Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan), 2001.
  - c. Analisa Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Keuangan, 2002
  - d. Analisis efektivitas Penggunaan Dana APBD Surabaya Dalam Menggerakkan Pembangunan Sektoral Di Surabaya : Kajian Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah, 2003.
  - e. Studi Pengendalian Inflasi Sebagai Sasaran Akhir Kebijakan Moneter Di Indonesia (Suatu Paradigma Baru), 2004.
  - f. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Melanjutkan Kontrak atau Tidak Pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Berasal dari Kabupaten Tulung Agung dan Trenggalek, 2004.
  - g. Pembinaan, Penataan, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Swasta Di Surabaya, 2004.
  - h. Optimalisasi Struktur Ekonomi Propinsi Jawa Timur Melalui Pemberdayaan di Sektor Basis, 2005.
  - i. Analisis Data Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Jawa Timur, 2005.

Surabaya, 11 September 2006

Nurul Istifadah, S.E.,M.Si.

Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Menurut Provinsi, Tahun 1990 - 2003

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)			Persentase Penduduk (%)			Kepadatan Penduduk			Laju Pertumbuhan (%)		
	1990	2000	2003	1990	2000	2003	1990	2000	2003	1980-1990	1990-2000	2000-2003
Nanggroe Aceh Darussalam	3,416	3,929	4,240	1.91	1.91	1.97	66	76	81	2.72	1.41	2.57
Sumatera Utara	10,252	11,642	11,923	5.74	5.66	5.54	139	158	162	2.06	1.28	0.80
Sumatera Barat	4,000	4,249	4,476	2.24	2.06	2.08	93	99	104	1.62	0.61	1.75
Riau	3,279	4,948	5,596	1.84	2.40	2.60	35	52	59	4.22	4.20	4.19
Jambi	2,018	2,407	2,583	1.13	1.17	1.20	38	45	48	3.39	1.78	2.38
Sumatera Selatan	5,492	6,899	6,522	3.08	3.35	3.03	68	74	70	3.15	2.31	-1.86
Bengkulu	1,179	1,564	1,525	0.66	0.76	0.71	60	79	77	4.38	2.87	-0.84
Lampung	6,016	6,731	6,963	3.37	3.27	3.23	170	191	196	2.66	1.13	1.14
Kep Bangka Belitung	820	900	988	0.46	0.44	0.46	-	56	61	-	0.94	3.16
Sumatera	36,472	43,269	44,816	20.43	21.02	20.82	76	90	93	-	1.72	1.18
DKI Jakarta	8,228	8,361	8,640	4.61	4.06	4.01	12,439	12,635	12,985	2.38	0.16	1.10
Jawa Barat	29,414	35,724	38,138	16.48	17.36	17.72	1,023	1,033	1,100	2.57	1.96	2.20
Jawa Tengah	28,516	31,223	32,175	15.98	15.17	14.95	876	959	987	1.17	0.91	1.01
DI Yogyakarta	2,913	3,121	3,211	1.63	1.52	1.49	914	980	1,007	0.57	0.69	0.95
Jawa Timur	32,488	34,766	36,270	18.20	16.89	16.85	678	726	756	1.08	0.68	1.42
Banten	5,968	8,098	8,999	3.34	3.93	4.18	-	836	1,038	-	3.10	3.58
Jawa	107,527	121,293	127,433	60.24	58.93	59.20	843	851	987	-	1.21	1.66
Bali	2,777	3,150	3,363	1.56	1.53	1.56	493	559	596	1.18	1.27	2.20
Nusa Tenggara Barat	3,369	4,009	4,025	1.89	1.95	1.87	167	199	199	2.14	1.75	0.13
Nusa Tenggara Timur	3,268	3,823	4,094	1.83	1.86	1.90	69	83	86	1.79	1.58	2.31
Bali dan Nusa Tenggara	9,414	10,882	11,482	5.27	5.34	5.33	139	152	157	-	1.55	1.50
Kalimantan Barat	3,228	4,016	3,969	1.81	1.95	1.84	22	27	27	2.65	2.21	-0.39
Kalimantan Tengah	1,396	1,855	1,838	0.78	0.90	0.85	9	12	12	3.86	2.88	-0.31
Kalimantan Selatan	2,597	2,984	3,188	1.45	1.45	1.48	60	69	73	2.32	1.40	2.23
Kalimantan Timur	1,875	2,452	2,720	1.05	1.19	1.26	8	11	12	4.41	2.72	3.52
Kalimantan	9,098	11,307	11,715	5.10	5.49	5.44	16	20	20	-	2.20	1.19
Sulawesi Utara	1,762	2,001	2,136	0.99	0.97	0.99	162	132	140	1.60	1.28	2.20
Sulawesi Tengah	1,703	2,176	2,221	0.95	1.06	1.03	27	35	35	2.82	2.48	0.68
Sulawesi Selatan	6,981	8,051	8,253	3.91	3.91	3.83	112	129	132	1.42	1.44	0.83
Sulawesi Tenggara	1,349	1,820	1,887	0.76	0.88	0.88	35	48	49	3.66	3.04	1.21
Gorontalo	716	833	885	0.40	0.40	0.41	-	68	72	-	1.53	2.04
Sulawesi	12,511	14,881	15,382	7.01	7.23	7.15	65	78	80	-	1.75	1.11
Maluku	1,154	1,163	1,224	0.65	0.56	0.57	40	26	26	2.76	0.08	1.72
Maluku Utara	699	732	858	0.39	0.36	0.40	-	25	28	-	0.46	5.44
Papua	1,630	2,214	2,366	0.91	1.08	1.10	5	6	6	3.40	3.11	2.24
Maluku dan Papua	3,483	4,109	4,448	1.95	2.00	2.07	8	9	10	-	1.67	2.68
<b>Indonesia</b>	<b>178,503</b>	<b>205,841</b>	<b>215,278</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>1.97</b>	<b>1.44</b>	<b>1.51</b>



## PDRB Sektoral Propinsi Jawa Timur Berdasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (Miliar Rupiah)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	9,669,999	10,302,358	11,164,745	12,845,397	14,872,969	28,832,429	32,775,611	35,811,358	41,857,757	47,360,511	50,907,467	16.30
Pertambangan & Galian	956,439	1,041,535	1,211,615	1,351,026	1,326,869	1,259,912	2,460,300	3,585,914	3,974,272	4,519,693	4,935,069	16.05
Industri pengolahan	12,382,976	15,586,765	18,718,258	22,097,863	26,343,658	38,257,842	41,158,117	45,816,274	51,779,630	60,337,145	67,021,816	16.59
Listrik & Gas & Air Bersih	716,130	887,851	1,206,834	1,397,128	1,696,947	2,141,754	2,828,360	4,093,704	5,277,651	6,164,081	7,455,509	23.74
Bangunan	3,049,827	3,777,121	4,442,518	5,196,021	5,920,107	7,266,956	7,355,906	7,968,869	8,574,301	9,637,495	10,766,553	12.15
Perdagangan, restoran & Hotel	10,017,909	11,857,873	13,852,310	15,975,481	19,026,576	32,069,409	34,478,053	39,165,955	46,415,169	54,849,450	63,978,773	18.36
Pengangkutan & Komunikasi	3,262,744	3,611,506	4,092,174	4,877,378	5,403,416	8,277,817	9,071,944	10,635,788	11,771,748	14,516,370	16,137,675	15.64
Keuangan, Persew Bgn & Jasa Persh	3,371,935	3,843,789	4,383,501	4,991,241	5,451,219	5,743,606	6,064,713	6,818,610	8,139,800	9,230,582	10,221,630	10.61
Jasa-Jasa	5,741,288	6,237,655	6,811,438	7,735,022	8,730,921	11,903,472	14,362,742	15,984,156	18,172,456	20,341,981	22,956,267	13.43
<b>PDRB</b>	<b>49,172,247</b>	<b>57,146,453</b>	<b>65,883,193</b>	<b>76,566,557</b>	<b>88,772,382</b>	<b>135,753,197</b>	<b>150,555,748</b>	<b>169,680,628</b>	<b>195,762,784</b>	<b>226,957,307</b>	<b>264,380,768</b>	<b>16.11</b>

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

## PDRB Sektoral Propinsi Jawa Timur Berdasar Harga Konstan 1993, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (Miliar Rupiah)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	9,669,999	9,666,050	9,866,093	10,253,902	10,360,820	9,840,471	10,056,430	10,126,247	10,246,977	10,461,875	10,649,955	0.88
Pertambangan & Galian	959,439	955,207	970,067	982,420	875,522	501,799	820,482	1,138,198	1,136,382	1,176,353	1,202,793	2.08
Industri pengolahan	12,382,976	13,990,976	15,802,745	17,698,276	19,409,566	15,104,078	15,096,119	15,357,553	15,597,266	15,335,943	15,767,592	2.22
Listrik & Gas & Air Bersih	716,130	787,545	1,011,892	1,139,847	1,143,104	1,179,195	1,332,448	1,483,158	1,584,202	1,710,560	1,863,984	9.09
Bangunan	3,049,827	3,433,306	3,854,810	4,239,635	4,370,533	2,918,521	2,629,205	2,607,913	2,631,188	2,657,381	2,707,175	-1.08
Perdagangan, restoran & Hotel	10,017,909	10,911,199	11,866,747	12,993,706	13,828,697	11,369,207	11,403,499	11,908,392	12,871,767	13,805,155	14,883,858	3.66
Pengangkutan & Komunikasi	3,262,744	3,504,855	3,800,166	4,162,808	4,236,276	4,051,086	4,441,895	4,745,527	4,792,518	5,327,308	5,531,795	4.92
Keuangan, Persew Bgn & Jasa Persh	3,371,935	3,583,711	3,766,256	3,979,809	4,145,932	3,296,434	3,087,743	3,183,521	3,378,586	3,522,599	3,657,758	0.74
Jasa-Jasa	5,741,288	5,914,633	6,101,730	6,302,066	6,483,126	6,138,106	6,191,149	6,296,011	6,501,294	6,756,904	6,987,258	1.80
<b>PDRB</b>	<b>49,172,247</b>	<b>52,727,482</b>	<b>57,040,506</b>	<b>61,752,469</b>	<b>64,863,576</b>	<b>54,398,897</b>	<b>55,058,970</b>	<b>56,856,520</b>	<b>58,760,180</b>	<b>60,764,056</b>	<b>63,262,166</b>	<b>2.32</b>

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

Distribusi Sektoral PDRB Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (dalam %)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	19.67	18.03	16.95	16.78	16.75	21.24	21.77	21.11	21.28	20.87	20.01	0.16
Pertambangan & Galian	1.95	1.82	1.84	1.75	1.49	0.93	1.63	2.11	2.03	1.99	1.94	-0.05
Industri pengolahan	25.18	27.28	28.41	28.86	29.68	28.18	27.34	26.88	26.45	26.59	26.35	0.41
Listrik & Gas & Air Bersih	1.46	1.55	1.83	1.82	1.91	1.58	1.88	2.41	2.70	2.72	2.93	6.56
Bangunan	6.20	6.61	6.74	6.79	6.67	5.35	4.89	4.70	4.38	4.25	4.23	-3.41
Perdagangan, restoran & Hotel	20.37	20.75	21.03	20.86	21.43	23.62	22.90	23.08	23.71	24.17	25.15	1.93
Pengangkutan & Komunikasi	6.64	6.32	6.21	6.50	6.09	6.10	6.03	6.27	6.01	6.40	6.34	-0.41
Kuangan, Persew Bgn & Jasa Prsh	6.86	6.73	6.65	6.52	6.14	4.23	4.03	4.02	4.16	4.07	4.02	-4.74
Jasa-Jasa	11.68	10.92	10.34	10.10	9.84	8.77	9.54	9.42	9.28	8.96	9.02	-2.31
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

Distribusi Sektoral PDRB Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Konstan 1993, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (dalam %)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	19.67	18.33	17.30	16.60	15.98	18.09	18.28	17.81	17.44	17.22	16.84	-1.40
Pertambangan & Galian	1.95	1.81	1.70	1.59	1.35	0.92	1.49	2.00	1.93	1.94	1.90	-0.23
Industri pengolahan	25.18	26.53	27.70	28.66	29.93	27.77	27.42	27.01	26.55	25.24	24.93	-0.09
Listrik & Gas & Air Bersih	1.46	1.49	1.77	1.85	1.76	2.17	2.42	2.61	2.71	2.82	2.95	6.62
Bangunan	6.20	6.51	6.76	6.87	6.74	5.37	4.78	4.59	4.48	4.37	4.28	-3.32
Perdagangan, restoran & Hotel	20.37	20.69	20.80	21.04	21.32	20.90	20.71	20.94	21.91	22.72	23.53	1.32
Pengangkutan & Komunikasi	6.64	6.65	6.66	6.74	6.53	7.45	8.07	8.35	8.16	8.77	8.75	2.54
Kuangan, Persew Bgn & Jasa Persh	6.86	6.78	6.60	6.44	6.39	6.06	5.81	5.62	5.75	5.80	5.78	-1.54
Jasa-Jasa	11.68	11.22	10.70	10.21	10.00	11.28	11.24	11.07	11.07	11.12	11.05	-0.50
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

PORB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993, Menurut Kabupaten / Kota, Tahun 1993 - 2003

Kabupaten/Kota	Tahun (Milliar Rupiah)											Perlambahan Rata-rata(%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	2003*	
<b>Kabupaten</b>												
Pacitan	348,280.17	361,178.96	375,527.80	395,358.69	403,845.17	373,386.45	378,968.43	393,740.00	401,335.29	413,266.13	426,022.27	1.85
Ponorogo	572,835.46	590,620.01	622,735.19	654,260.50	674,319.80	622,343.44	641,025.71	690,941.68	795,261.37	728,971.45	757,115.31	2.57
Trenggalek	355,336.53	372,981.49	382,575.37	402,847.73	415,886.84	392,434.78	391,734.28	408,777.76	421,067.10	437,416.83	456,924.38	2.31
Tulungagung	1,022,653.41	1,086,172.14	1,167,502.40	1,277,196.16	1,341,472.73	1,130,629.43	1,148,389.65	1,228,687.73	1,265,545.92	1,515,434.93	1,362,853.50	2.65
Blitar	685,508.08	707,250.38	727,914.94	796,987.34	811,643.30	731,426.93	755,651.02	806,239.50	818,543.91	850,460.56	883,909.30	2.34
Kediri	1,290,643.87	1,334,439.97	1,397,109.10	1,470,485.94	1,519,020.64	1,309,233.03	1,352,581.70	1,419,133.11	1,161,337.71	1,512,075.17	1,566,935.90	1.78
Malang	2,068,007.55	2,150,800.94	2,304,187.25	2,477,859.15	2,554,003.75	2,287,707.37	2,314,757.62	2,398,071.32	2,316,366.79	2,406,704.47	2,494,421.91	1.72
Lumajang	878,715.97	909,297.14	957,749.87	1,010,545.02	1,035,409.23	884,621.59	896,298.84	920,175.54	956,360.81	985,573.88	1,024,727.40	1.41
Jember	1,684,499.53	1,774,354.63	1,863,792.32	1,982,563.40	2,008,303.80	1,779,848.01	1,811,053.10	1,878,241.06	1,951,454.23	2,044,625.60	2,129,054.87	2.15
Banyuwangi	1,592,082.18	1,655,185.00	1,750,678.09	1,878,548.38	1,923,242.34	1,878,582.84	1,680,755.81	1,738,888.34	1,797,170.97	1,858,168.75	1,926,836.73	1.75
Bondowoso	528,398.68	544,807.43	575,040.67	611,300.58	629,089.19	575,351.56	582,681.20	596,379.65	626,288.28	647,328.42	667,226.00	2.14
Situbondo	653,423.87	687,318.90	711,740.53	742,712.89	767,884.69	689,230.42	698,122.81	713,913.54	745,913.64	775,278.81	805,160.01	1.92
Probolinggo	1,088,563.53	1,133,815.01	1,198,948.24	1,276,821.85	1,355,183.73	1,183,332.32	1,187,118.72	1,204,777.75	1,241,527.77	1,299,246.40	1,228,682.79	1.11
Pasuruan	2,065,304.49	2,229,552.88	2,447,990.91	2,709,559.69	2,813,698.03	2,429,907.37	2,461,313.90	2,541,749.58	2,654,421.11	2,758,144.18	2,879,937.45	3.07
Sidoarjo	4,074,304.42	4,518,226.30	4,999,759.11	5,392,723.23	5,688,350.67	4,532,682.05	4,580,671.98	4,760,372.12	4,930,685.62	5,155,918.73	5,674,185.00	3.06
Mojokerto	1,001,877.30	1,049,649.32	1,125,726.93	1,190,420.74	1,222,428.25	1,041,508.54	1,078,829.82	1,103,102.03	1,159,588.21	1,182,663.04	1,226,476.42	1.86
Jombang	876,161.37	915,425.88	974,694.76	1,043,961.81	1,079,628.65	941,323.53	956,067.44	979,781.85	1,013,808.50	1,053,141.36	1,085,607.48	1.97
Nganjuk	711,057.82	738,126.93	781,040.43	833,353.97	860,031.00	746,023.21	753,867.92	771,945.37	791,768.04	823,016.24	854,364.55	1.68
Madiun	481,958.33	495,080.65	514,311.89	549,230.94	574,133.98	499,565.27	502,823.42	510,020.34	531,580.60	552,660.47	574,197.91	1.60
Magetan	557,140.06	571,992.48	593,733.12	622,181.81	635,805.25	560,907.08	568,518.05	587,958.68	607,608.51	629,685.98	649,876.70	1.41
Ngawi	615,280.89	628,455.98	656,111.66	693,792.93	711,359.53	639,807.35	649,685.01	665,272.11	693,862.75	720,181.58	747,402.22	1.78
Bojonegoro	842,929.14	865,012.64	894,393.45	932,484.73	963,502.65	850,472.27	861,736.46	878,579.50	904,027.72	936,954.58	972,226.09	1.31
Tuban	1,451,271.50	1,549,911.26	1,660,411.71	1,787,240.31	1,801,993.28	1,380,612.44	1,539,101.64	1,577,787.79	1,666,854.74	1,730,725.59	1,603,378.01	1.99
Lamongan	847,621.85	866,937.63	910,863.69	950,534.16	978,060.37	886,854.94	905,166.07	931,021.45	966,945.50	1,005,067.80	1,042,934.80	1.90
Gresik	2,757,403.44	2,955,524.77	3,185,603.22	3,533,375.00	3,705,592.31	3,005,954.69	3,117,478.29	3,302,182.77	3,451,410.00	3,621,552.12	3,798,944.57	2.96
Bangkalan	596,693.38	615,287.04	638,604.81	672,440.37	689,487.68	629,165.18	629,615.99	641,523.26	647,967.45	670,022.50	692,211.36	1.36
Sampang	585,164.22	604,289.19	632,775.94	663,855.39	672,703.11	618,389.92	628,929.32	638,267.75	658,943.24	601,688.44	705,027.45	1.71
Pamekasan	458,323.12	478,781.52	500,955.05	524,729.74	542,935.57	481,796.08	482,180.94	493,091.94	498,359.93	515,629.36	533,755.28	1.39
Sumenep	784,938.77	795,654.22	831,939.44	900,213.80	988,252.12	944,835.53	908,991.12	939,464.63	854,949.60	885,729.72	914,432.22	1.40
<b>Kota</b>												
Kediri	3,529,661.36	3,967,203.35	4,467,161.19	4,872,405.99	5,377,234.01	4,853,529.15	4,857,796.42	4,888,528.87	4,949,496.05	4,702,189.68	4,862,440.36	2.95
Blitar	222,758.53	235,742.61	250,269.46	268,873.16	284,910.98	239,616.48	243,020.16	252,008.68	264,410.55	275,776.03	286,752.77	2.32
Malang	1,865,782.20	2,084,721.31	2,284,694.94	2,492,119.39	2,653,064.65	2,074,986.17	2,075,765.61	2,120,077.32	2,188,678.55	2,260,422.91	2,347,554.30	2.11
Probolinggo	483,021.02	513,291.57	558,372.71	606,785.94	632,959.65	515,409.00	516,376.87	525,279.22	529,390.69	552,648.04	577,290.52	1.63
Pasuruan	259,188.63	278,768.65	307,206.14	331,442.88	350,721.76	309,940.36	315,578.39	330,537.51	345,373.58	361,617.66	375,628.68	3.43
Mojokerto	241,017.94	259,200.25	283,724.54	311,685.82	322,713.22	282,297.34	287,862.44	298,440.72	317,040.14	330,867.51	343,969.14	3.29
Madiun	344,847.21	374,769.69	411,712.43	444,803.04	481,442.07	393,742.29	399,873.21	410,484.34	428,432.96	444,868.89	461,303.89	2.68
Surabaya	10,749,593.84	11,847,752.59	13,092,946.88	14,446,766.59	15,373,281.89	11,933,442.11	11,903,847.82	12,311,076.00	12,821,973.92	13,445,042.44	14,107,530.78	2.50
Batu					0.00	0.00	0.00	0.00	184,426.65	194,290.42	203,830.02	3.39
<b>Jawa Timur</b>	<b>49,172,247.66</b>	<b>52,727,480.71</b>	<b>57,040,503.98</b>	<b>61,762,469.06</b>	<b>64,853,576.89</b>	<b>64,398,896.52</b>	<b>65,062,237.18</b>	<b>67,056,520.81</b>	<b>68,560,180.40</b>	<b>60,885,056.47</b>	<b>63,451,128.34</b>	<b>2.34</b>

Sumber : Karakteristik Penduduk Provinsi Jawa Timur, 2000-2003

Keterangan : \* = angka sementara; \*\* = angka sangat sementara  
Pertumbuhan rata-rata kota Batu untuk tahun 2001-2003

PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1993-2003

Kabupaten/Kota	Tahun (Milliar Rupiah)											Pertumbuhan Rata-rata(%)	
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	2003**		
<b>Kabupaten</b>													
Pacitan	348,280.17	383,946.36	422,038.35	484,773.23	554,914.47	935,191.73	1,065,174.42	1,195,154.60	1,364,978.94	1,550,468.47	1,711,361.67	15.57	
Ponorogo	572,835.46	629,675.27	703,428.35	806,813.97	928,570.41	1,552,977.31	1,773,093.85	2,062,327.03	2,372,742.19	2,697,070.10	3,989,577.16	19.30	
Trenggalek	355,336.53	397,459.37	431,471.17	493,882.61	573,638.84	943,472.08	1,088,899.00	1,229,915.53	1,414,494.32	1,618,188.79	1,783,603.52	15.80	
Tulungagung	1,022,653.41	1,164,715.27	1,337,416.48	1,572,465.88	1,830,675.46	2,805,607.29	3,166,089.01	3,660,244.48	4,209,889.16	4,887,077.88	5,489,420.98	16.51	
Blitar	685,508.08	756,038.85	826,202.73	994,023.05	1,143,318.74	1,897,955.74	2,208,011.12	2,559,674.94	2,907,835.96	3,319,860.95	3,704,699.39	16.58	
Kediri	1,290,643.87	1,429,018.38	1,583,353.62	1,805,206.85	2,106,014.40	3,434,219.76	3,919,898.34	4,446,017.85	5,078,380.17	5,816,612.69	6,453,360.27	15.76	
Malang	2,068,007.55	2,302,978.43	2,619,902.82	3,053,838.73	3,517,021.20	5,697,439.80	6,418,144.63	7,249,771.90	7,898,397.40	9,079,004.41	10,155,640.89	15.57	
Lumajang	878,715.97	976,047.33	1,094,235.81	1,249,700.26	1,441,387.65	2,330,476.67	2,633,676.00	2,930,750.75	3,391,411.56	3,891,071.08	4,335,096.05	15.61	
Jember	1,684,499.53	1,902,723.15	2,125,891.09	2,440,143.75	2,766,722.17	4,542,554.35	5,132,723.74	5,773,954.85	6,635,968.58	7,704,833.16	8,600,022.15	15.98	
Banyuwangi	1,592,082.18	1,784,688.46	2,012,523.27	2,332,425.43	2,659,037.21	4,222,139.24	4,687,892.26	5,257,992.22	6,073,975.77	7,004,158.74	7,783,916.93	15.52	
Bondowoso	528,398.68	581,902.90	651,007.03	752,620.64	870,987.85	1,465,013.37	1,684,937.25	1,850,528.53	2,154,809.29	2,471,523.17	2,742,524.55	16.15	
Situbondo	653,423.87	741,169.56	817,048.37	9,199,128.41	1,068,110.69	1,762,820.16	1,981,855.22	2,213,985.13	2,601,804.06	2,976,506.16	3,332,152.63	15.96	
Probolinggo	1,088,563.53	1,222,384.80	1,370,933.37	1,579,268.99	1,874,652.99	3,107,230.55	3,421,213.76	3,763,134.52	4,326,604.21	4,998,040.69	5,526,601.36	15.92	
Pasuruan	2,065,304.49	2,410,165.89	2,839,225.19	359,601.87	3,838,269.97	6,121,056.10	6,859,352.36	7,685,343.49	8,971,494.42	10,553,046.80	11,860,540.45	17.22	
Sidoarjo	4,074,304.42	4,892,176.52	5,758,909.41	6,570,056.79	7,705,139.99	11,134,468.45	12,213,720.62	13,948,411.72	16,010,989.96	18,776,823.48	21,130,684.28	16.14	
Mojokerto	1,001,877.30	1,139,438.26	1,302,779.39	1,487,061.51	1,696,341.36	2,631,961.80	2,993,403.86	3,351,593.22	3,877,845.59	4,475,739.66	4,991,450.63	15.72	
Jombang	876,161.37	980,175.12	1,105,748.40	1,282,066.99	1,493,974.73	2,419,092.92	2,727,008.73	3,028,695.88	3,478,800.65	4,003,866.84	4,436,138.34	15.89	
Nganjuk	711,057.82	791,105.22	887,981.49	1,027,708.04	1,186,559.69	1,876,363.59	2,093,625.75	2,328,193.84	2,662,536.42	3,035,985.83	3,380,899.92	15.23	
Madiun	481,958.33	529,337.48	583,989.25	678,835.32	801,024.01	1,276,785.80	1,435,294.27	1,582,779.08	1,860,627.82	2,135,294.46	2,379,994.41	15.62	
Magetan	557,140.06	615,566.01	679,408.89	780,030.19	890,802.33	1,425,929.02	1,603,731.41	1,821,526.35	2,156,380.75	2,493,394.58	2,753,800.39	15.63	
Ngawi	615,280.89	671,964.26	745,668.23	859,541.77	984,126.72	1,621,222.21	1,827,153.62	2,031,527.46	2,379,780.14	2,723,275.68	2,998,285.18	15.49	
Bojonegoro	842,929.14	923,405.44	1,014,664.65	1,155,493.47	1,331,306.35	2,133,095.60	2,398,964.04	2,659,933.60	3,087,568.93	3,533,075.08	3,885,404.30	14.85	
Suban	1,451,271.50	1,672,233.40	1,940,216.02	2,260,013.98	2,500,395.20	3,374,456.28	4,263,244.30	4,689,012.51	5,556,632.83	6,360,328.19	7,116,406.90	15.55	
Lamongan	847,821.85	929,046.01	1,041,015.86	1,180,943.65	1,356,792.85	2,249,793.41	2,545,717.22	2,850,561.39	3,360,970.21	3,832,700.78	4,235,295.82	15.75	
Gresik	2,757,403.44	3,213,928.34	3,730,332.23	4,443,657.16	5,108,938.50	6,933,242.70	7,866,233.99	9,248,657.60	10,966,860.32	12,892,730.92	14,655,473.37	16.40	
Bangkalan	596,693.38	663,741.94	734,505.70	847,755.33	967,702.16	1,606,882.24	1,780,128.18	1,994,353.92	2,288,163.10	2,606,561.41	2,878,498.23	15.38	
Sampang	585,164.22	648,237.33	722,813.63	826,669.00	935,110.04	1,601,976.75	1,794,911.29	1,986,216.82	2,361,488.81	2,681,053.98	2,964,276.01	15.89	
Parekasan	458,323.12	512,999.21	570,490.75	6,499,321.42	753,851.21	1,211,409.76	1,363,772.83	1,517,270.16	1,727,117.81	1,972,695.45	2,194,868.44	15.30	
Sumenep	784,936.77	851,260.05	946,230.49	1,108,293.66	1,407,512.14	2,571,617.59	2,782,121.34	3,109,565.41	3,025,982.46	3,470,792.34	3,833,936.88	15.51	
<b>Kota</b>													
Kediri	3,529,661.36	4,519,479.47	5,398,322.19	6,222,822.85	7,479,775.86	13,491,319.01	14,327,619.99	15,704,935.91	17,778,464.59	20,154,731.38	22,411,658.28	18.30	
Blitar	222,758.53	254,270.95	287,408.76	331,558.15	387,054.82	558,217.31	610,834.65	699,349.02	820,400.37	945,645.33	1,072,576.69	15.36	
Malang	1,865,782.20	2,267,156.85	2,670,795.40	3,105,175.95	3,613,585.73	5,196,119.73	5,590,354.87	6,235,329.56	7,141,881.98	8,369,622.11	9,424,955.97	15.86	
Probolinggo	483,021.02	554,819.64	640,944.56	751,148.11	856,584.84	1,227,648.06	1,318,120.86	1,485,951.58	1,669,014.28	1,948,816.91	2,198,681.95	14.77	
Pasuruan	259,168.63	300,894.99	352,441.42	404,825.60	476,870.02	723,787.53	807,070.71	940,216.42	1,095,546.63	1,270,360.49	1,438,917.20	16.86	
Mojokerto	241,017.94	280,180.47	325,889.26	381,156.28	440,969.67	638,312.61	706,804.98	836,643.49	998,650.31	1,140,462.82	1,295,443.15	16.52	
Madiun	344,847.21	403,551.10	472,012.50	544,323.81	648,284.84	921,620.50	1,149,397.95	1,325,792.56	1,536,180.92	1,729,772.29	1,925,891.25	15.79	
Surabaya	10,749,593.84	12,848,591.35	15,135,946.45	17,824,207.99	20,580,397.61	28,110,721.95	30,468,908.43	34,601,709.02	40,178,020.74	47,369,002.00	53,767,080.55	15.76	
Batu					0.00	0.00	0.00	0.00	562,310.96	660,108.11	746,740.96	9.92	
<b>Jawa Timur</b>	<b>49,172,247.66</b>	<b>57,146,473.43</b>	<b>65,883,192.68</b>	<b>87,686,666.71</b>	<b>88,772,382.72</b>	<b>135,763,196.98</b>	<b>149,639,806.70</b>	<b>169,680,627.73</b>	<b>195,774,384.45</b>	<b>226,866,707.84</b>	<b>256,369,768.24</b>	<b>16.16</b>	

Sumber : Karakteristik Penduduk Provinsi Jawa Timur, berbagai terbitan, disusun dan diolah kembali.

Keterangan : \* = angka sementara; \*\* = angka sangat sementara  
Pertumbuhan rata-rata kota Batu untuk tahun 2001-2003

## Distribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1993-2003

Kabupaten/Kota	Tahun (Dalam %)											Pertumbuhan Rata-rata (%)	
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*	2003*		
<b>Kabupaten</b>													
Pacitan	0.71	0.68	0.66	0.64	0.62	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	-0.48	
Ponorogo	1.16	1.12	1.09	1.06	1.04	1.14	1.16	1.21	1.36	1.20	1.19	0.22	
Trenggalek	0.72	0.71	0.67	0.65	0.64	0.70	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.03	
Tulungagung	2.08	2.06	2.05	2.07	2.07	2.08	2.09	2.15	2.16	2.49	2.15	0.29	
Blitar	1.39	1.34	1.28	1.29	1.25	1.34	1.37	1.41	1.40	1.40	1.39	-0.01	
Kediri	2.62	2.53	2.45	2.38	2.34	2.41	2.46	2.49	1.98	2.48	2.47	-0.55	
Malang	4.21	4.08	4.04	4.01	3.94	4.17	4.20	4.20	3.96	3.95	3.93	-0.61	
Lumajang	1.79	1.72	1.68	1.64	1.60	1.63	1.63	1.61	1.63	1.62	1.61	-0.92	
Jember	3.43	3.37	3.27	3.21	3.10	3.27	3.29	3.29	3.33	3.36	3.36	-0.19	
Banyuwangi	3.24	3.14	3.07	3.04	2.97	3.08	3.05	3.05	3.07	3.05	3.04	-0.58	
Bondowoso	1.07	1.03	1.01	0.99	0.97	1.06	1.06	1.05	1.07	1.06	1.05	-0.20	
Situbondo	1.33	1.30	1.25	1.20	1.18	1.27	1.27	1.25	1.27	1.27	1.27	-0.42	
Probolinggo	2.21	2.15	2.10	2.07	2.09	2.18	2.16	2.11	2.12	2.13	1.94	-1.21	
Pasuruan	4.20	4.23	4.29	4.39	4.34	4.47	4.47	4.45	4.53	4.53	4.54	0.71	
Sidoarjo	8.29	8.57	8.77	8.73	8.79	8.33	8.32	8.34	8.42	8.47	8.94	0.70	
Mojokerto	2.04	1.99	1.97	1.93	1.88	1.91	1.96	1.93	1.98	1.94	1.93	-0.48	
Jombang	1.78	1.74	1.71	1.69	1.66	1.73	1.74	1.72	1.73	1.73	1.71	-0.37	
Nganjuk	1.45	1.40	1.37	1.35	1.33	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.65	
Madiun	0.98	0.94	0.90	0.89	0.89	0.92	0.91	0.89	0.91	0.91	0.90	-0.72	
Magetan	1.13	1.08	1.04	1.01	0.98	1.03	1.03	1.03	1.04	1.03	1.02	-0.91	
Ngawi	1.25	1.19	1.15	1.12	1.10	1.18	1.18	1.17	1.18	1.18	1.18	-0.55	
Bojonegoro	1.71	1.64	1.57	1.51	1.49	1.56	1.57	1.54	1.54	1.54	1.53	-1.02	
Tuban	2.95	2.94	2.91	2.89	2.78	2.54	2.80	2.77	2.85	2.84	2.84	-0.34	
Lamongan	1.72	1.64	1.60	1.54	1.51	1.63	1.64	1.63	1.65	1.65	1.64	-0.43	
Gresik	5.61	5.61	5.58	5.72	5.71	5.53	5.66	5.79	5.89	5.95	5.99	0.60	
Bangkalan	1.21	1.17	1.12	1.09	1.06	1.16	1.14	1.12	1.11	1.10	1.09	-0.96	
Sampang	1.19	1.15	1.11	1.08	1.04	1.14	1.14	1.47	1.13	0.99	1.11	-0.62	
Pamekasan	0.93	0.91	0.88	0.85	0.84	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	-0.93	
Sumenep	1.60	1.51	1.46	1.46	1.52	1.74	1.65	1.65	1.46	1.45	1.44	-0.93	
<b>Kota</b>													
Kediri	7.18	7.52	7.83	7.89	8.29	8.92	8.92	8.57	8.45	7.72	7.66	0.60	
Blitar	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	-0.02	
Malang	3.79	3.92	4.01	4.04	4.09	3.81	3.77	3.72	3.74	3.71	3.70	-0.23	
Probolinggo	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.95	0.94	0.92	0.90	0.91	0.91	-0.69	
Pasuruan	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.57	0.57	0.58	0.59	0.59	0.59	1.06	
Mojokerto	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.92	
Madiun	0.70	0.71	0.72	0.72	0.74	0.72	0.73	0.72	0.73	0.73	0.73	0.33	
Surabaya	21.86	22.47	22.95	23.39	23.70	21.94	21.62	21.58	21.90	22.08	22.23	0.15	
Batu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.32	0.32	0.66	
<b>Jawa Timur</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	

Sumber : Karakteristik Penduduk Provinsi Jawa Timur, 2000-2003

Keterangan : \* = angka sementara; \*\* = angka sangat sementara

Pertumbuhan rata-rata kota Batu untuk tahun 2001-2003

Distribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Kabupaten / Kota, Tahun 1993 - 2003

Kabupaten/kota	Tahun (Dalam %)										Pertumbuhan Rate-rata(%)	
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*		2003**
Kabupaten												
Pacitan	0.71	0.67	0.64	0.55	0.63	0.69	0.71	0.70	0.70	0.68	0.67	-0.50
Ponorogo	1.16	1.10	1.07	0.92	1.04	1.14	1.19	1.22	1.22	1.19	1.56	2.70
Trenggalek	0.72	0.70	0.65	0.56	0.65	0.69	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	-0.31
Tulungagung	2.08	2.04	2.03	1.79	2.06	2.07	2.12	2.16	2.16	2.15	2.15	0.30
Blitar	1.39	1.32	1.25	1.13	1.29	1.40	1.48	1.51	1.49	1.46	1.45	0.36
Kediri	2.62	2.50	2.40	2.06	2.37	2.53	2.62	2.62	2.62	2.56	2.53	-0.34
Malang	4.21	4.03	3.98	3.48	3.96	4.20	4.29	4.27	4.03	4.00	3.98	-0.51
Lumajang	1.79	1.71	1.66	1.43	1.62	1.72	1.76	1.73	1.73	1.71	1.70	-0.47
Jember	3.43	3.33	3.23	2.78	3.12	3.35	3.43	3.40	3.39	3.39	3.37	-0.16
Banyuwangi	3.24	3.12	3.05	2.66	3.00	3.11	3.13	3.10	3.10	3.09	3.06	-0.55
Bondowoso	1.07	1.02	0.99	0.86	0.98	1.08	1.11	1.09	1.10	1.09	1.07	-0.01
Situbondo	1.33	1.30	1.24	1.09	1.20	1.30	1.33	1.30	1.33	1.31	1.30	-0.17
Probolinggo	2.21	2.14	2.08	1.80	2.11	2.29	2.29	2.22	2.21	2.20	2.16	-0.21
Pasuruan	4.20	4.22	4.31	0.41	4.32	4.51	4.59	4.53	4.58	4.65	4.64	0.92
Sidarejo	8.29	8.56	8.74	7.49	8.68	8.20	8.17	8.22	8.18	8.27	8.27	-0.01
Mojokerto	2.04	1.99	1.98	1.70	1.91	1.94	2.00	1.98	1.98	1.97	1.95	-0.38
Jombang	1.78	1.72	1.68	1.46	1.68	1.78	1.82	1.78	1.78	1.76	1.74	-0.23
Nganjuk	1.45	1.38	1.35	1.17	1.34	1.38	1.40	1.37	1.36	1.34	1.32	-0.80
Madiun	0.98	0.93	0.89	0.77	0.90	0.94	0.96	0.93	0.95	0.94	0.93	-0.46
Magetan	1.13	1.08	1.03	0.89	1.00	1.05	1.07	1.07	1.10	1.10	1.08	-0.45
Ngawi	1.25	1.18	1.13	0.98	1.11	1.19	1.22	1.20	1.22	1.20	1.17	-0.58
Bojonegoro	1.71	1.62	1.54	1.32	1.50	1.57	1.60	1.57	1.58	1.56	1.51	-1.12
Tuban	2.95	2.93	2.94	2.58	2.82	2.49	2.85	2.76	2.84	2.80	2.79	-0.52
Lamongan	1.72	1.63	1.58	1.35	1.53	1.66	1.70	1.68	1.72	1.69	1.66	-0.35
Gresik	5.61	5.62	5.66	5.07	5.76	5.11	5.26	5.45	5.60	5.68	5.74	0.21
Bangkalan	1.21	1.16	1.11	0.97	1.09	1.18	1.19	1.18	1.17	1.18	1.13	-0.67
Sampang	1.19	1.13	1.10	0.94	1.05	1.18	1.20	1.17	1.21	1.18	1.16	-0.23
Pamekasan	0.93	0.90	0.87	0.85	0.85	0.89	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	-0.73
Sumenep	1.60	1.49	1.44	1.26	1.59	1.89	1.86	1.83	1.55	1.53	1.50	-0.56
Kota												
Kediri	7.18	7.91	8.19	7.10	8.43	9.94	9.58	9.26	9.08	8.88	8.78	1.84
Blitar	0.45	0.44	0.44	0.38	0.44	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	-0.69
Malang	3.79	3.97	4.05	3.54	4.07	3.83	3.74	3.67	3.65	3.69	3.69	-0.25
Probolinggo	0.98	0.97	0.97	0.86	0.96	0.90	0.88	0.88	0.85	0.86	0.86	-1.19
Pasuruan	0.53	0.53	0.53	0.46	0.54	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	0.56	0.61
Mojokerto	0.49	0.49	0.49	0.43	0.50	0.47	0.47	0.49	0.51	0.50	0.51	0.31
Madiun	0.70	0.71	0.72	0.62	0.73	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	-0.32
Surabaya	21.86	22.48	22.97	20.32	23.18	20.71	20.38	20.39	20.52	20.87	21.05	-0.34
Batu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.60
Jawa Timur	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Sumber : Karakteristik Penduduk Provinsi Jawa Timur, berbagai terbitan, disusun dan diolah kembali.  
 Keterangan : \* = angka sementara; \*\* = angka sangat sementara  
 Pertumbuhan rata-rata kota Batu untuk tahun 2001-2003

## Lampiran 9

## Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (dalam %), Tahun 1994 – 2002

Kabupaten/Kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Rata-Rata
Kabupaten :										
Pacitan	3.70	3.97	5.28	2.15	(7.54)	1.49	3.90	1.74	3.36	3.20
Ponorogo	3.10	5.44	5.06	3.07	(7.71)	3.00	7.79	1.54	3.45	4.06
Trenggalek	4.94	2.60	5.30	3.24	(8.04)	2.43	4.35	3.33	3.99	3.77
Tulungagung	6.21	7.49	9.40	5.03	(15.72)	1.57	6.99	2.48	3.90	5.38
Blitar	3.17	2.92	9.49	1.84	(9.88)	3.31	6.69	2.99	3.49	4.24
Kediri	3.39	4.70	5.25	3.30	(13.81)	3.31	4.92	3.04	3.99	3.99
Malang	4.00	7.13	7.54	3.07	(11.21)	2.07	3.60	3.58	3.96	4.37
Lumajang	3.48	5.33	5.51	2.46	(14.56)	1.32	2.66	3.99	3.43	3.52
Jember	5.33	5.04	6.37	1.30	(11.38)	1.75	3.71	3.41	4.15	3.88
Banyuwangi	3.96	5.77	7.30	2.38	(12.83)	0.25	3.46	3.39	3.42	3.74
Bondowoso	3.11	5.55	6.31	2.91	(8.54)	1.27	2.35	4.07	3.87	3.68
Situbondo	5.19	3.55	4.35	3.39	(10.24)	1.29	2.26	4.53	4.27	3.60
Probolinggo	4.16	5.74	6.50	6.14	(12.68)	0.31	1.49	2.23	2.66	3.65
Pasuruan	7.95	9.80	10.69	3.84	(13.64)	1.29	3.27	4.12	2.72	5.46
Sidoarjo	10.90	10.66	7.86	5.67	(20.46)	1.06	3.92	4.41	5.97	6.31
Mojokerto	4.77	7.25	5.75	2.69	(14.80)	3.58	2.25	2.67	3.89	4.11
Jombang	4.48	6.47	7.11	3.42	(12.81)	1.57	2.48	3.27	4.18	4.12
Nganjuk	3.81	5.81	6.70	3.20	(13.26)	1.05	2.40	3.11	3.85	3.74
Madiun	2.72	3.88	6.79	4.53	(12.99)	0.65	1.43	3.05	3.72	3.35
Magetan	2.67	3.80	4.79	2.19	(11.78)	1.36	3.42	2.18	3.37	2.97
Ngawi	2.14	4.40	5.74	2.53	(10.06)	1.54	2.40	4.98	3.35	3.39
Bojonegoro	2.62	3.40	4.26	3.33	(11.73)	1.32	1.95	2.38	3.16	2.80
Taban	6.80	7.13	7.64	0.83	(23.38)	11.48	2.51	5.65	3.59	5.70
Lamongan	2.28	5.07	4.36	2.90	(9.33)	2.06	2.86	3.90	3.96	3.42
Gresik	7.19	7.78	10.92	4.87	(18.88)	3.71	5.92	4.03	4.48	6.11
Bangkalan	3.12	3.79	5.30	2.54	(8.75)	0.07	1.89	2.33	3.71	2.84
Sampang	3.27	4.71	4.91	1.33	(8.07)	1.70	1.48	3.12	3.77	3.04
Pamekasan	4.46	4.63	4.75	3.47	(11.26)	0.08	2.26	1.35	4.34	3.17
Sumenep	1.37	4.56	8.21	9.78	(4.39)	(4.01)	3.58	(7.33)	2.99	2.39
Kota :										
Kediri	12.40	12.60	9.07	10.36	(9.74)	0.09	0.63	1.50	(5.14)	5.19
Blitar	5.83	6.16	7.43	5.96	(15.90)	1.42	3.70	4.77	6.24	5.19
Malang	10.66	10.65	9.08	6.46	(21.79)	0.04	2.13	2.64	2.50	5.52
Probolinggo	6.27	8.78	8.67	4.31	(18.57)	0.19	1.72	1.73	4.08	4.47
Pasuruan	7.55	10.20	7.89	5.82	(11.63)	1.82	4.74	4.23	6.19	6.06
Mojokerto	7.54	9.46	9.86	3.54	(12.52)	1.97	3.67	6.10	5.93	6.01
Madiun	8.68	9.86	8.04	8.24	(18.22)	0.73	3.50	4.65	5.59	6.16
Surabaya	10.22	10.51	10.34	6.41	(22.38)	(0.25)	3.42	4.22	4.87	6.22
Jawa Timur	7.23	8.18	8.26	5.02	(16.12)	1.21	3.26	3.33	3.41	4.99

Sumber : Indikator Makro Ekonomi Jawa Timur, 1994-2003; Rata-rata tidak termasuk tahun 1998.

## Lampiran 9

Lampiran 10

PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Kabupaten / Kota, Tahun 1993 - 1999

Kabupaten/Kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*	Rata-Rata
Pacitan	689.707,41	714.149,49	741.678,37	760.257,24	726.630,70	738.290,95	743.195,93	753.391,56	771.488,12	791.286,41	739.784,15
Ponorogo	676.746,50	696.427,14	731.090,91	766.142,61	714.765,48	734.769,85	801.686,75	815.874,36	840.902,37	870.889,14	728.116,17
Trenggalek	557.949,03	581.550,55	592.897,33	620.585,86	629.614,53	584.486,80	619.341,48	634.337,82	655.225,63	671.942,23	591.660,49
Tulungagung	1.136.537,91	1.203.158,89	1.289.517,87	1.407.147,65	1.220.920,13	1.237.532,85	1.302.162,24	1.333.280,57	1.375.536,27	1.419.539,99	1.278.564,37
Bilar	653.404,37	673.811,15	693.145,38	759.295,32	764.103,82	711.960,83	735.989,99	743.682,59	796.019,62	796.794,19	706.031,25
Kediri	945.871,73	972.980,59	1.013.898,91	1.062.555,87	1.080.848,15	982.336,55	983.042,62	1.004.877,95	1.032.165,63	1.062.444,67	983.445,52
Malang	904.196,83	932.807,34	991.670,15	1.058.646,78	1.068.883,87	940.070,01	966.696,45	997.273,77	1.032.424,10	1.066.509,57	978.114,08
Lumajang	942.080,28	972.599,77	1.022.459,05	1.077.164,40	1.089.895,37	940.070,01	966.696,45	997.273,77	1.032.424,10	1.066.509,57	978.114,08
Jember	805.762,42	845.635,87	895.603,88	939.818,19	937.255,74	838.840,80	858.166,32	884.615,83	921.344,81	953.986,10	868.499,26
Banyuwangi	1.087.417,27	1.127.816,76	1.190.033,47	1.273.905,63	1.288.949,87	1.118.360,11	1.143.937,78	1.177.029,46	1.211.578,05	1.251.234,93	1.172.164,33
Bondowoso	793.781,14	815.277,31	857.551,62	908.832,27	921.480,47	847.181,41	866.166,32	893.613,94	918.418,50	941.560,51	854.692,26
Situbondo	1.119.340,33	1.170.781,35	1.206.053,70	1.252.450,03	1.274.901,57	1.145.898,81	1.170.334,71	1.215.282,46	1.255.389,61	1.296.414,08	1.196.628,59
Probolinggo	1.158.745,25	1.196.949,30	1.255.767,97	1.327.340,42	1.378.419,75	1.184.275,27	1.195.639,48	1.220.336,63	1.256.104,23	1.291.838,15	1.241.941,57
Pasuruan	1.682.245,43	1.791.457,38	1.941.147,57	2.121.167,04	1.825.806,44	1.817.296,67	1.867.202,23	1.922.063,15	1.998.985,77	2.028.530,67	1.903.551,72
Sidoarjo	3.228.875,13	3.480.278,49	3.746.086,36	3.993.380,18	3.079.271,88	2.991.213,12	3.076.354,26	3.096.415,52	3.146.406,46	3.194.587,14	3.482.324,92
Mojokerto	1.236.574,12	1.282.581,14	1.362.286,54	1.427.287,70	1.433.173,56	1.235.601,73	1.194.346,52	1.213.931,82	1.239.479,55	1.266.364,36	1.312.124,31
Jombang	819.084,30	850.437,17	900.321,87	959.280,38	943.541,09	851.318,64	857.255,22	879.308,08	905.473,95	925.939,41	885.516,18
Nganjuk	743.663,76	769.243,80	811.417,46	863.386,88	876.171,84	762.258,17	765.340,48	779.822,72	805.280,22	830.903,03	797.504,81
Magetan	756.631,42	775.792,70	804.435,62	857.460,58	884.387,84	772.954,93	782.715,18	813.534,24	843.443,53	874.078,51	802.728,55
Ngawi	686.553,01	909.893,00	944.452,85	969.449,71	997.845,58	693.112,73	844.865,34	977.274,20	1.013.624,73	1.046.921,79	928.626,12
Bojonegoro	748.287,93	762.747,87	783.691,53	812.237,80	825.320,84	727.746,05	740.209,23	756.061,88	800.357,88	889.818,57	810.400,89
Tuban	1.449.013,79	1.534.634,58	1.631.464,63	1.743.067,89	1.723.134,05	1.444.781,94	1.487.662,83	1.570.239,47	1.618.078,22	1.674.308,88	1.547.768,16
Lamongan	729.368,70	742.075,93	775.903,11	806.098,71	815.443,76	746.315,75	766.840,20	791.598,85	817.793,16	843.873,49	764.275,09
Gresik	3.102.968,65	3.283.008,11	3.494.959,56	3.891.371,41	3.920.080,12	3.200.453,24	3.271.081,89	3.362.348,13	3.469.760,50	3.584.511,90	3.424.169,59
Bangkalan	781.648,65	801.660,21	827.891,43	887.742,25	872.482,19	794.950,11	796.046,58	749.720,23	765.229,26	781.209,04	818.431,97
Sampang	80.460,50	820.810,90	849.699,33	891.540,31	873.419,21	792.681,57	796.046,58	749.720,23	765.229,26	781.209,04	818.431,97
Pamekasan	704.634,43	727.215,94	752.030,07	778.841,61	788.118,43	690.777,30	691.642,42	690.107,75	704.905,70	721.140,84	731.705,75
Sumenep	826.418,00	83.071,84	886.000,88	953.276,04	1.008.718,00	915.460,04	991.227,92	840.813,84	864.259,93	885.854,55	798.836,14
Kota :	13.791.780,26	15.368.359,17	17.163.499,55	18.574.424,91	20.124.630,70	17.996.299,37	19.435.790,39	19.664.509,49	18.669.986,50	19.292.871,79	17.266.310,14
Kediri	1.841.236,23	197.764,43	2.046.607,98	2.188.291,25	2.288.643,82	1.932.335,38	2.099.921,00	2.195.239,20	2.241.589,49	2.324.883,50	1.772.600,08
Bilar	2.552.575,65	2.774.331,49	3.017.832,64	3.238.015,74	3.389.851,71	2.502.659,20	2.624.969,31	2.893.952,03	2.966.830,98	3.058.435,68	2.655.370,11
Malang	2.627.013,13	2.753.902,18	2.956.464,73	3.173.874,52	3.234.501,74	2.558.778,57	2.697.793,21	2.692.853,15	2.784.219,28	2.882.820,22	2.842.722,13
Probolinggo	1.642.919,54	1.744.376,53	1.898.431,85	2.023.634,92	2.081.545,95	1.813.688,99	1.894.721,57	1.998.227,16	2.069.052,87	2.125.438,15	1.859.597,27
Pasuruan	2.331.401,35	2.475.647,09	2.678.747,64	2.805.727,98	2.940.332,22	2.547.287,47	2.734.927,17	2.879.565,34	2.976.453,94	3.071.180,48	2.630.636,10
Mojokerto	2.022.979,53	2.198.462,40	2.410.706,02	2.602.009,07	2.769.456,05	2.269.283,81	2.419.523,98	2.526.212,19	2.624.037,91	2.721.861,97	2.364.306,69
Magetan	4.145.778,74	4.493.665,41	4.886.055,10	5.306.743,93	5.466.572,85	4.183.404,67	4.700.808,15	4.869.596,53	5.078.808,14	5.302.823,46	4.854.954,49
Surabaya	1.479.027,12	1.573.517,81	1.689.485,80	1.815.976,69	1.889.895,92	1.554.221,38	1.614.502,80	1.646.086,13	1.697.325,85	1.613.911,42	1.648.636,20

Sumber : Karakeristik Penduduk Prop. Jawa Timur, 2000-2003

Keterangan : \* = angka sementara



## Lampiran 11

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur  
Menurut Kabupaten / Kota, Tahun 1996, 1999, 2002

Kabupaten/Kota	Indeks Harapan Hidup			Indeks Pendidikan			Indeks Daya Beli			IPM		
	1996	1999	2002	1996	1999	2002	1996	1999	2002	1996	1999	2002
<b>Kabupaten</b>												
1 Pacitan	72.00	74.70	76.15	63.00	65.60	67.78	66.20	51.49	47.49	67.10	63.90	63.81
2 Ponorogo	68.30	69.30	69.77	60.10	62.20	63.53	65.10	49.85	53.02	64.50	60.40	62.11
3 Trenggalek	73.20	74.00	74.43	66.20	70.70	72.56	64.50	50.77	54.44	68.00	65.20	67.14
4 Tulungagung	75.00	75.20	75.40	70.70	70.20	72.92	67.70	52.35	54.73	71.10	65.90	67.68
5 Blitar	69.80	72.50	73.85	66.60	67.70	70.22	67.30	51.27	55.36	67.90	63.80	66.48
6 Kediri	68.70	71.30	72.62	65.10	71.10	72.79	66.60	50.20	58.09	66.80	64.20	67.83
7 Malang	66.00	68.80	70.65	65.20	68.30	71.57	66.50	50.2	53.55	65.90	62.40	65.26
8 Lumajang	63.70	66.50	70.32	58.60	62.90	64.92	67.40	49.69	49.85	63.20	59.70	61.70
9 Jember	56.30	57.80	58.67	55.70	58.20	63.88	65.10	48.62	53.18	59.10	54.90	58.58
10 Banyuwangi	62.70	65.30	68.32	65.70	67.10	68.19	67.70	51.57	54.05	65.40	61.30	63.52
11 Bondowoso	53.70	56.30	57.48	45.50	52.20	50.60	67.00	51.58	49.05	55.40	53.40	52.38
12 Situbondo	57.70	60.50	61.87	51.60	52.60	54.28	68.30	51.38	49.24	59.20	54.80	55.13
13 Probolinggo	53.00	55.80	58.58	52.50	54.60	69.63	66.10	51.01	53.04	57.20	53.80	57.08
14 Pasuruan	57.70	60.50	63.92	61.20	67.20	71.60	65.70	48.91	49.48	61.50	58.90	61.67
15 Sidoarjo	68.80	71.50	73.17	80.60	83.10	84.15	67.30	52.67	54.95	72.30	69.10	70.75
16 Mojokerto	68.20	70.80	73.20	69.00	72.10	74.05	67.30	50.86	59.44	68.10	64.60	68.90
17 Jombang	66.70	69.30	70.47	70.80	74.50	74.34	67.40	51.45	58.28	68.30	65.10	67.70
18 Nganjuk	67.20	69.80	71.47	66.50	70.30	70.45	66.70	50.13	49.90	66.80	63.40	63.94
19 Madiun	67.00	69.70	72.53	62.50	65.50	68.14	67.20	53.10	55.35	65.60	62.80	65.34
20 Magetan	73.80	74.30	74.65	65.10	67.80	73.03	66.10	52.09	59.00	68.30	64.70	68.89
21 Ngawi	67.20	70.00	71.78	60.00	64.70	64.88	67.70	50.96	54.13	65.00	61.90	63.60
22 Bojonegoro	64.80	67.50	68.72	60.20	64.40	63.41	64.20	46.33	48.60	63.10	59.40	60.24
23 Tuban	65.30	68.00	70.93	53.20	59.90	62.95	65.90	50.68	54.34	61.50	59.50	62.74
24 Lamongan	66.30	69.00	70.55	61.60	66.10	69.25	65.50	50.23	53.90	64.50	61.80	64.57
25 Gresik	67.80	70.50	73.48	71.40	77.70	76.64	66.50	50.86	59.35	68.60	66.40	69.82
26 Bangkalan	57.00	59.80	62.20	44.50	50.30	60.08	63.60	47.05	55.06	55.00	52.40	59.11
27 Sampang	50.00	52.80	54.72	34.00	42.00	41.28	60.60	47.20	55.42	48.20	47.30	50.47
28 Pamekasan	57.30	60.20	64.45	52.60	58.70	60.90	64.60	47.47	55.28	58.20	55.50	60.21
29 Sumenep	59.20	59.80	60.12	48.60	52.70	55.38	69.00	51.73	49.52	58.90	54.70	55.00
<b>Kota</b>												
30 Kediri	69.50	72.30	73.50	79.20	80.70	83.37	66.70	52.87	54.34	71.80	68.60	70.41
31 Blitar	72.80	74.30	75.32	76.00	79.70	82.63	68.30	52.69	48.86	72.40	68.90	68.94
32 Malang	65.80	68.70	69.73	79.20	82.00	84.33	68.20	53.16	49.05	71.10	68.00	67.71
33 Probolinggo	68.00	70.80	76.10	70.90	73.30	70.83	69.40	51.23	54.75	69.50	65.10	67.23
34 Pasuruan	62.50	65.20	68.32	71.70	74.20	78.33	68.40	51.53	54.89	67.50	63.60	67.18
35 Mojokerto	74.50	75.00	75.38	79.60	80.90	84.46	70.50	49.86	55.20	74.90	68.60	71.68
36 Madiun	72.30	73.50	74.00	79.10	80.40	83.57	69.30	52.06	55.04	73.60	68.70	70.87
37 Surabaya	69.30	72.20	74.08	81.40	82.60	84.83	65.40	53.01	48.99	72.10	69.30	69.30
Jawa Timur	64.70	67.50	69.17	63.90	67.40	69.82	68.00	50.62	48.95	65.50	61.80	62.64

Sumber : Indikator Makro Ekonomi 1998 - 2002.

Table with multiple columns and rows, containing numerical data. The table is partially obscured by large dark stains.